

**POLA PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEKITAR OBYEK WISATA
PANTAI TIRTA SAMUDRA JEPARA**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai derajat sarjana S-2**

**Program pasca sarjana universitas diponegoro
Program studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



**diajukan oleh :
KHAERON SYARIEFUDIN
D4E002041**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2004

**POLA PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKITAR OBYEK WISATA PANTAI TIRTA SAMUDRA JEPARA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

KHAERON SYARIFUDIN

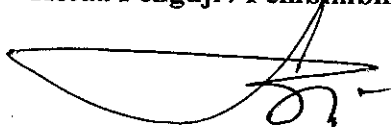
D4E002041

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal : 7 September 2004

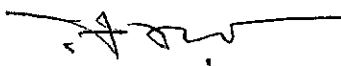
Susunan Tim Penguji :

Ketua Penguji / Pembimbing 1 :



Drs. H. Ali Mufiz, MPA.

Pembimbing 2 :



Drs. Hardi Warsono, MTP

Anggota Dewan Penguji



Dra. Endang Larasati S, MS



Drs. M. Mustam, MS

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar magister Sain

Tanggal 7 September 2004

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro Semarang



Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PHD

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3536/T/Map/ef
Tgl.	3/3 08

RINGKASAN

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pola partisipasi masyarakat pada keberadaan obyek wisata Tirta Samodra dengan mengidentifikasi sikap masyarakat sekitar obyek wisata, manfaat Obyek Wisata terhadap kehidupan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan guna pengembangan obyek wisata, harapan masyarakat terhadap pengembang obyek wisata serta bentuk partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pengembangan obyek wisata. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun format dan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata terkait dengan pola partisipasi dan pemberdayaan masyarakat..

Hasil analisa data yang bersumber dari wawancara mendalam terhadap key informan serta hasil pengamatan peneliti dan interpretasi data, menunjukkan bahwa sikap masyarakat pada keberadaan obyek wisata sangat positif, yaitu mereka setuju dengan pengembangan obyek wisata asal selaras dengan norma agama dan masyarakat. Keberadaan obyek wisata sekarang ini belum dapat dirasakan manfaatnya dan mereka berharap dengan upaya pengembangan obyek wisata manfaat akan segera dapat dirasakan masyarakat. Pengembangan obyek wisata akan menciptakan peluang baru dalam pengembangan usaha masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Untuk pengembangan obyek wisata dibutuhkan partisipasi masyarakat sekitar berupa tenaga dan modal. Program pengembangan obyek wisata masih belum optimal, baik ditinjau dari proses perencanaannya sampai pada implementasi program. Meski demikian pada babak

pemanfaatan hasil pembangunan keaktifan mulai muncul. Oleh karena itu pola partisipasi masyarakat yang dihasilkan adalah pola pasif.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dilakukan dengan peningkatan pola partisipasi dari pasif menuju pola partisipasi aktif, kemudian keterikatan dan akhirnya pola permintaan. Strategi pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata dilakukan melalui dua tahap, yang pertama strategi arahan dengan tujuan menarik simpati masyarakat dengan menanamkan kesadaran manfaat keberadaan obyek yang berdampak meningkatkan taraf hidup, meski belum berorientasi pada keuntungan. Tahap kedua dengan melakukan kontrak pengelola dan masyarakat yang menguntungkan kedua belah pihak, Tahap ketiga adalah peningkatan partisipasi dengan pemenuhan usulan kegiatan, dengan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat, menumbuhkan kegiatan sekitar obyek wisata, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sendiri dan menguatkan posisi tawar dalam pembangunan lokal dan nasional.

ABSTRAKSI

Peneliti Khaeron Syarifudin, Semarang 2004 : Pola Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Obyek Wisata Pantai Tirta Samudra Jepara

Kata kunci : Sikap, Partisipasi, pariwisata, pemberdayaan

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata di berbagai destinasi wisata mendorong dilakukannya penelitian ini. Permasalahan utama penelitian ini adalah : bagaimanakah pola partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata Tirta Samudra, dan bagaimana konsep pemberdayaan yang sesuai dengan pola partisipasinya. Club Du Sahel (Mikkelsen, 2001) mempolakan partisipasi dalam 4 jenis bertingkat, yakni : Pola 1 : Pasif, Pola 2 : Aktif, pola 3 : Keterikatan, Pola 4 : Permintaan.

Hasil penelitian tersarikan dalam butir-butir berikut :

1. Partisipasi dalam program dan proyek pembangunan pada umumnya dan khususnya kegiatan yang berkait dengan kebutuhan hidup masyarakat menunjukan pola aktif (pola 2), namun demikian , untuk kegiatan wisata masih pada pola pasif (pola 1).
2. Pola partisipasi pasif dalam kegiatan wisata terutama nampak pada : tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Implikasi dari temuan ini adalah : diperlukan strategi pentahapan dalam pemberdayaan (pemeliharaan obyek dan pemberdayaan dalam ekonomi kerakyatan). Tahap 1 : arahan, tahap 2 : ikatan kontrak, tahap 3 : usulan kegiatan.

ABSTRACT

Peneliti Khaeron Syariefudin, Semarang 2004 : The Participation Pattern and Enforcement of Community Surround Tirta Samudra Beach, Jepara.

Lack of community involvement in tourism on many tourism resort encourage this research to be done. The main issues of this research are: how is the participation pattern of community surround tourism object Tirta Samudera Beach Jepara and how is the enforcement concept that suitable with the participation pattern. Club Du Sahel (Mikkelsen, 2001) patterned a participation into 4 level of involvement; pattern 1; passive, pattern 2; active, pattern 3; bonding, pattern 4; demand.

The result of this research concluded to these points :

1. The participation on the programme and development project generally and especially activities that involves with the need of community shows active pattern (pattern 2), although, for the tourism activities remain in the passive pattern pattern 1).
2. Passive participation pattern in tourism activities appears on planning and implementing stage.

The implication of these founding are: The need of leveling strategies in enforcement (object maintenance and enforcement of the peoples economy). Level 1: direction, level 2: contract bond, level 3: activities proposal.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2004

Khaeron Syariefudin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, karena atas kuasa dan hidayah-Nya, tesis ini dengan judul “Pola Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Obyek Wisata Pantai Tirta Samodra Jepara” dapat kami susun dan selesai sesuai rencana. Berbagai kendala, yang terutama berupa padatnya kegiatan pada tempat kerja penulis merupakan tantangan yang harus penulis taklukkan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana S-2 Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti telah banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama dari Bapak Drs. Ali Mufiz MPA dan Bapak Drs. Hardi Warsono MTP selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan pemikiran positif dan berharga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sesuai rencana yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal itu, maka ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya pada kesempatan pertama penulis haturkan kepada kedua beliau tersebut.

Ucapan terimakasih penulis persembahkan juga kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang, Seluruh dosen pengajar pada Program

Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh staf administrasi sekretariat.

3. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Jepara yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Istri dan anak-anakku yang telah memberikan semangat dan dorongan serta doa selama penulis mengikuti pendidikan dari sejak penulis mengikuti kuliah sampai pada penyusunan tesis ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa MAP, khususnya angkatan VI kelas intensif atas suasana persaudaraan dan kerjasama yang terbangun baik selama menempuh program ini.

Atas semua dukungan, dorongan dan bantuan serta bimbingan yang Bapak, ibu dan saudara berikan, penulis berharap dan berdoa semoga mendapat balasan yang sepadan dari – Nya.

Peneliti menyadari bahwa materi dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh sebab itu peneliti akan dengan lapang hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Berkehendak selalu menyertai dan melindungi kita semua.

Semarang, 30 Agustus 2004

Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan	12
BAB II : TINJUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
A.1 Pengembangan Pariwisata	13
A.2 Pengembangan Kawasan Wisata	14
B. Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata	15
B.1 Partisipasi dan Pemberdayaan	15
B.2 Fenomena Penelitian	29
B.2.1. Pola Partisipasi	29
B.2.2. Pemberdayaan Masyarakat	34
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Rancangan Penelitian	36
B. Ruang Lingkup	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Fenomena Penelitian	37

1. Definisi Konsep	37
2. Definisi Operasional	38
E. Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
F. Instrumen Penelitian	40
G. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi	40
2. Sampel	40
H. Teknik Pengumpulan Data	43
I. Teknik Analisa Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara	44
2. Gambaran Umum Kecamatan Jepara	56
3. Gambaran Umum Desa Bandengan	68
4. Pantai Tirta Samudra	73
B. Identitas Responden	80
C. Fenomena Penelitian	85
1. Pola Partisipasi	85
a. Sikap	86
b. Manfaat	90
c. Kebutuhan	98

d.	Bentuk	101
e.	Pelibatan pada Pentahapan Proyek	103
	1.Perencanaan	103
	2.Pelaksanaan	104
	3.Pemanfaatan Hasil	104
2.	Pemberdayaan	105
a.	Obyek Wisata dan Lingkungannya	106
b.	Ekonomi Masyarakat	108
D.	Diskusi	110
1.	Pola Partisipasi	110
	1.1. Sikap	110
	1.2. Manfaat	110
	1.3. Kebutuhan	111
	1.4. Bentuk	112
2.	Pemberdayaan	120
	Tahap I : Arahan	120
	Tahap II : Ikatan Kontrak	120
	Tahap III : Usulan Kegiatan	121
BAB V : PENUTUP	123
A.	Kesimpulan	123
1.	Pola Partisipasi	123
B.	Saran	124
	Daftar Pustaka.....	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Urutan Banyaknya Pengunjung.....	5
Tabel 1.2 Urutan Banyaknya Pendapatan	6
Tabel II.1 Dimensi-imensi Pengembangan Destinasi	16
Tabel III.1 Fenomena Penelitian	38
Tabel III.2 Populasi dan Sampel	42
Tabel IV.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Jepara	47
Tabel IV.2 Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	48
Tabel IV.3 Komposisi Penduduk Menurut Usia	49
Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel IV.5 Penduiduk Menurut Agama	51
Tabel IV.6 Mutasi Penduduk	52
Tabel IV.7 Bangunan Sekolah	53
Tabel IV.8 AnakPutus Sekolah	54
Tabel IV.9 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	55
Tabel IV.10 Wilayah Desa/Kelurahan di Kab. Jepara	58
Tabel IV.11 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin ...	59
Tabel IV.12 Komposisi Penduduk Menurut Usia	59
Tabel IV.13 Anak Putus Sekolah	60
Tabel IV.14 Penduduk Menurut Agama	61
Tabel IV.15 Mutasi Penduduk	62
Tabel IV.16 Bangunan Sekolah di Kecamatan Jepara	63

Tabel IV.17 Penduduk Menurut Kelamin Desa Bandengan	68
Tabel IV.18 Penduduk Menurut Usia Desa Bandengan	69
Tabel IV.19 Mata Pencanharian Penduduk	70
Tabel IV.20 Tingkat Pendidikan Penduduk	71
Tabel IV.21 Penduduk Menurut Agama	72
Tabel IV.22 Mutasi Penduduk	72
Tabel IV.23 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	80
Tabel IV.24 Penduduk Menurut Umur	81
Tabel IV.25 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	82
Tabel IV.26 Penduduk Menurut JarakTempat Tinggal	83
Tabel IV.27 Penduduk Menurut Lama Tinggal	84
Tabel IV.28 Tingkat Kesenangan Keberadaan Objek	86
Tabel IV.29 Tingkat Kesenangan Pengembangan Objek	88
Tabel IV.30 Manfaat Yang Diharapkan	90
Tabel IV.31 Manfaat Yang Dirasakan	94
Tabel IV.32 Harapan Responden	98
Tabel IV.33 Kebutuhan Responden	99
Tabel IV.34 Bentuk Partisipasi	101
Tabel IV.35 Identitas Responden	102
Tabel IV.36 Pola partisipasi Perencanaan	103
Tabel IV.37 Pola Partisipasi Pelaksanaan	104
Tabel IV.38 Pola Partisipasi Pemanfaatan Hasil	104
Tabel IV.39 Matrik Dimensi Wisata dan Bentuk Partisipasi ...	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I Konsep keterikatan pelaku wisata.....	14
Gambar II.1 Persyaratan relay akan program.....	20
Gambar IV.1 Peta Geografis dan obyek wisata.....	45
Gambar IV. 2a. Dermaga pantai Kartini.....	64
Gamber IV. 2b. Dermaga Pantai Karimunjawa.....	64
Gambar IV. 3. Beberapa obyek Musium Kartini.....	65
Gambar IV. 4. Pantai Tirta Samodra.....	74
Gambar IV. 5. Pengunjung pantai dengan nuansa pasir putih.....	75
Gambar IV. 6. Rumah Makan Apung di Tengah laut.....	76
Gamber IV. 7. RA Kartini dan Suami.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak pengertian tentang pariwisata, seiring dengan makin dipandang pentingnya kegiatan ini untuk dapat menyokong berlangsungnya pembangunan. Salah satu pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Soekadijo (2000 : 2), yakni : "Pariwisata merupakan kegiatan yang berhubungan dengan wisatawan ". Apabila pengertian tersebut kita gunakan untuk memaknai pariwisata, maka lingkup kegiatan pariwisata menjadi sangat luas dan beragam. Lebih lanjut dikemukakan bila suatu kegiatan tidak dapat mendatangkan wisatawan meski terkerangkai kata pariwisata, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut gagal, atau bukan kegiatan pariwisata lagi.

Meski diterpa berbagai kondisi yang tidak kondusif, pariwisata Indonesia tetap berbenah diri dengan melibatkan diri dalam aktivitas pariwisata dunia, misalnya dalam program PBB yang menetapkan tahun 2002 sebagai Tahun Internasional Ekowisata dan Tahun Pegunungan Internasional.

Di tingkat Jawa Tengah dilakukan berbagai pembenahan pariwisata. Untuk menjaring wisatawan asing, Jawa Tengah juga memanfaatkan ATF (Asean Tourism Forum) 2002 di Yogyakarta. Bila dibandingkan dengan pesaingnya, Jawa Tengah masih kalah lincah dengan Yogya dan Bali dalam menyuguhkan kekayaan wisatanya (Jawa Pos, 30 Januari 2002). Sementara itu untuk makin menguatkan pariwisatanya juga dipersiapkan rencana penetapan Taman Nasional Merapi - Merbabu yang kental nuansa

ekowisatanya. Tujuan Ekowisata dan Volcana ini adalah pengalihan pandangan dan saratnya kesibukan sehari-hari

bahkan kadang stress menjadi suasana santai yang alami atau " Back to Nature Ecotourism ".

Pada tahun 1996, Direktorat Jenderal Pariwisata menentukan tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata antara lain untuk : penerimaan devisa, pengembangan ekonomi dengan memberikan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan apresiasi luar negeri, dan lain sebagainya. (Undang-undang No. 5 / 1992 tentang Kepariwisataan) Sebagai kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pariwisata harus melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Untuk peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan upaya untuk membuka kesadaran tentang kemanfaatan pariwisata bagi masyarakat.

Pariwisata juga dipahami sebagai gejala kepergian orang-orang di dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyeberangan orang-orang pada tapal batas suatu negara (pariwisata internasional). (Salah Wahab, 1996). Selanjutnya proses bepergian ini mengakibatkan terjadinya interaksi dan hubungan, saing pengertian insani, perasaan, persepsi, motivasi, tekanan, kepuasan, kenikmatan antar sesama pribadi atau antar kelompok. Hal ini pariwisata sangat terkait dengan perilaku. Dan untuk memahaminya, diperlukan studi perilaku.

Kegiatan wisata berkait dengan banyak pelaku. Untuk mengembangkan wisata tidak dapat dengan mengembangkan salah satu atau beberapa pelaku wisata saja, tetapi harus simultan diupayakan secara serius pengembangan

berbagai komponen. Selain manajemen obyek wisata harus dikemas dengan profesional, infra struktur dan fasilitas obyek serta dukungan masyarakat di sekitar obyek harus mendapat perhatian. Dengan mengabaikan salah satu pelaku komponen tersebut pengembangan obyek wisata akan timpang. Sementara itu, dari sisi partisipasi masyarakat sekitar obyek pun perlu pencermatan, siapa dan apa saja yang telah dan bisa dikembangkan untuk mendukung kegiatan wisata lokal.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan termasuk kabupaten dengan obyek wisata yang memiliki potensi kekhususan (unik) yang besar. Keunikan pertama nampak pada karakteristik masyarakat Jepara yang mempunyai keahlian tinggi di bidang seni ukir, baik bersifat mebelair maupun seni ukir untuk cinderamata termasuk patung. Kekhususan kedua pada kabupaten ini adalah tempat / daerah dilahirkan dan dibesarkannya pahlawan nasional RA Kartini, selain juga memiliki situs peninggalan Portugis berupa benteng. Kekuatan lain wisata di Kabupaten Jepara terletak pada kondisi alamnya, terutama pantai-pantainya. Selain pantai Kartini, salah satu pantai yang menjadi andalan masa depan wisata Jepara adalah pantai Tirta Samudra atau dikenal dengan pantai Bandengan. Selain berpasir putih yang jarang dimiliki oleh pantai lain di pantai utara pulau Jawa, pantai ini relatif masih asli/ alami.

Sebagai gambaran kekuatan masing-masing obyek wisata di Kabupaten Jepara, berikut data perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun 2001 sampai 2003. Data ini merupakan data olahan yang ingin mengetahui kekuatan setiap obyek wisata di Jepara dari tahun ke tahun dilihat dari jumlah pengunjungnya. Pantai Kartini memang selalu menempati urutan pertama dari jumlah kunjungan

secara keseluruhan. Kinerja berbagai obyek tidak selalu sama. Ada kalanya obyek wisata berada di urutan ke 2 (Goa Tritip), lalu menurun drastis menjadi urutan ke 11. Yang ingin diketahui dari pengurutan banyaknya pengunjung dari tahun ke tahun ini adalah, bagaimana kedudukan pantai Tirta Samudra dalam pengurutan tersebut dari tahun ke tahun ?

TABEL I.I.
URUTAN BANYAKNYA PENGUNJUNG DI BERBAGAI OBYEK
WISATA JEPARA (2001,2002,2003)

No.	Nama Obyek	Banyak Pengunjung				
		Wisman	%	Wisnus	%	Jumlah
	TAHUN 2001					
1	Pantai Kartini	3,110	1.55	197,848	98.45	200,958
2	Goa Tritip		0.00	102,482	100.00	102,482
3	Pantai Tirta Samudra	5,006	5.99	78,546	94.01	83,552
4	Sender/ Kalinyamat		0.00	61,575	100.00	61,575
5	TNL Karimunjawa	1,108	2.07	52,370	97.93	53,478
6	Benteng Portugis	163	0.35	46,985	99.65	47,148
7	Masjid Mantingan	421	3.62	11,203	96.38	11,624
8	Musium Ra. Kartini	93	2.04	4,477	97.96	4,570
9	Mon.Ari-ari Kartini		0.00	4,005	100.00	4,005
10	Air Terjun Songgolangit		0.00	3,915	100.00	3,915
11	Sreni Indah		0.00	2,200	100.00	2,200
12	Pulau Panjang		0.00	1,485	100.00	1,485
	JUMLAH	6,791	1.81	369,243	98.19	376,034

	Tahun 2002					
1	Pantai Kartini	3,694	2.61	138,103	97.39	141,797
2	Masjid Mantingan	0	0.00	133,490	100.00	133,490
3	Pantai Tirta Samudra	2,750	3.60	73,631	96.40	76,381
4	Sender/ Kalinyamat		0.00	38,141	100.00	38,141
5	Benteng Portugis	0	0.00	19,140	100.00	19,140
6	Pulau Panjang	364	3.96	8,832	96.04	9,196
7	Air Terjun Songgolangit	3	0.05	6,446	99.95	6,449
8	Musium Ra. Kartini	95	1.74	5,370	98.26	5,465
9	TNL Karimunjawa	216	5.02	4,087	94.98	4,303
10	Mon.Ari-ari Kartini		0.00	4,225	100.00	4,225
11	Goa Tritip		0.00	165	100.00	165
12	Sreni Indah		0.00	96	100.00	96
	JUMLAH	3,428	1.15	293,623	98.85	297,051

	TAHUN 2003					
1	Pantai Kartini	3,694	2.61	138,103	97.39	141,797
2	Masjid Mantingan	0	0.00	133,490	100.00	133,490
3	<i>Pantai Tirta Samudra</i>	2,750	3.60	73,631	96.40	76,381
4	Sender/ Kalinyamat		0.00	38,141	100.00	38,141
5	Benteng Portugis	0	0.00	19,140	100.00	19,140
6	Pulau Panjang	364	3.96	8,832	96.04	9,196
7	Air Terjun Songgolangit	3	0.05	6,446	99.95	6,449
8	Musium Ra. Kartini	95	1.74	5,370	98.26	5,465
9	TNL Karimunjawa	216	5.02	4,087	94.98	4,303
10	Mon.Ari-ari Kartini		0.00	4,225	100.00	4,225
11	Goa Tritip		0.00	165	100.00	165
12	Sreni Indah		0.00	96	100.00	96
	JUMLAH	3,428	1.15	293,623	98.85	297,051

Sumber: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kab. Jepara, 2003, diolah

Jika dilihat dari perkembangan jumlah pengunjung selama 3 tahun terakhir,

obyek pantai Tirta Samudra selalu menempati urutan ke tiga.

TABEL 1.2.
URUTAN BANYAKNYA PENDAPATAN YANG DITERIMA
DI BERBAGAI OBYEK WISATA KAB. JEPARA (2001,2002,2003)

No.	Nama Obyek	Banyak Pendapatan		
		Parkir	%	Keseluruhan
	TAHUN 2001			
1	Pantai Kartini	31,140	0.03	116,754,800
2	Partial Tirta Samudra	31,627	0.05	62,689,250
3	Sender/ Kalinyamat		0.00	42,515,000
4	Benteng Portugis	23,547	0.06	40,985,900
5	TNL Karimunjawa	19,471	0.44	4,434,500
6	Goa Tritip	25,821	0.69	3,754,000
7	Air Terjun Songgolangit	1,552	0.09	1,648,100
8	Musium Ra. Kartini	171	0.01	1,423,900
9	Sreni Indah	1,982	0.14	1,390,000
10	Pulau Panjang	936	0.10	913,900
11	Masjid Mantingan	0	0	
12	Mon.Ari-ari Kartini	1,909	0	
	JUMLAH	138,156	0.05	276,509,350
	TAHUN 2002			
1	Pantai Kartini	24,080	0.02	122,292,500
2	Pantai Tirta Samudra	16,423	0.02	72,454,850
3	Benteng Portugis	8,780	0.05	18,342,300
4	Sonder/ Kalinyamat		0.00	8,998,300
5	Goa Tritip	46,886	0.94	5,000,000
6	Masjid Mantingan	0	0.00	4,258,000
7	Air Terjun Songgolangit	1,973	0.07	2,955,600
8	Musium Ra. Kartini	214	0.01	2,076,200
9	Sreni Indah	1,053	0.13	797,600
10	Pulau Panjang	470	0.06	737,000
11	TNL Karimunjawa	16,326	0	
12	Mon.Ari-ari Kartini	1,607	0	
	Jumlah	117,812	0.05	237,912,350
	TAHUN 2003			
1	Pantai Kartini	16,436	0.01	208,583,150
2	Pantai Tirta Samudra	14,510	0.01	101,245,900
3	Benteng Portugis	8,186	0.03	31,969,100
4	TNL Karimunjawa		0.00	10,800,200
5	Masjid Mantingan	71,454	1.43	5,000,000
6	Air Terjun Songgolangit	1,816	0.07	2,716,600
7	Musium Ra. Kartini	169	0.01	2,159,650
8	Pulau Panjang	0	0.00	874,500
9	Sreni Indah			0
10	Goa Tritip	99		0
11	Sonder/ Kalinyamat	17,750		0
12	Mon.Ari-ari Kartini	1,545		0
		131,965	0.04	363,349,100

Sumber : Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kab. Jepara, 2003, diolah.

Banyaknya pengunjung ternyata belum tentu banyak pendapatan. Besar

pendapatan juga terkait dengan sifat obyek. Masjid Mantingan, misalnya, dari jumlah kunjungan yang berada pada urutan ke 7 lalu naik pada peringkat 2 dalam pendapatan bergerak dari urutan 11,6 lalu 5. Namun Benteng Portugis yang jumlah kunjungannya berkisar pada urutan 5-6, menempati urutan ke 3 - 4 dalam perolehan pendapatan. **Pantai Tirta Samudra**, pada jumlah pengunjung selalu menempati urutan ke 3, dalam perolehan pendapatan selalu berada pada urutan terbesar ke dua setelah pantai Kartini. Posisinya selalu mantap pada nomor tersebut. Pantai Kartini lebih banyak penunjang obyek yang sifatnya create, dibanding alami. Namun pantai Tirta Samudra ini lebih memungkinkan pengembangannya bila dilihat dari aspek keaslian dan keunikan alam, dibandingkan pantai Kartini.

Potensi yang cukup besar pada alam laut seperti juga pada pantai Tirta Samudra pada kenyataannya masih dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang dapat menghambat pembangunan potensi kelautan tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1). Pelibatan masyarakat lokal dalam pelestarian alam dan pembangunan yang rendah.

Kerusakan habitat akibat kurangnya kelibatan masyarakat lokal dalam pelestariannya. kerusakan tersebut misalnya berupa kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, eksploitasi sumber daya hayati laut yang tidak terkendali, pencemaran, konflik pemanfaatan ruang, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan masyarakat nelayan (Rokhmin Dahuri, 2000). Pelaku perusakan tidak jarang dilakukan oleh orang luar. Hingga saat ini masih merupakan masalah yang aktual yaitu adanya

kesenjangan dan kelemahan masyarakat nelayan sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemitraan baik dari segi pembinaan ketrampilan maupun dukungan pendanaan terhadap masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat berdampak pada apatisme masyarakat nelayan dalam pembangunan dan peningkatan kemiskinan masyarakat. Pada umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik maupun di bidang pendidikan. Keterbatasan ekonomi itu nampak pada tingkat pendapatan nelayan yang pada umumnya masih rendah. Ada nelayan yang dari segi ekonomi cukup berhasil, namun disamping jumlahnya tidak banyak, keberhasilan tersebut lebih nampak pada mereka yang merangkap profesi sebagai pedagang.

Keterbatasan sosial yang dialami oleh nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, karena secara fisik masyarakat nelayan tidak lagi dapat dikatakan terisolasi. Keterbatasan sosial tersebut lebih terwujud pada ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian pada kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya kemampuan mereka untuk mengembangkan organisasi diluar komunitas lokal (Boedhisantoso, 1999). Karena itulah mereka mengalami nasib terpinggirkan (marjinal) dari proses kemajuan.

Keterbatasan pendidikan dapat dilihat pada kondisi sumber daya manusia yang masih rendah, terutama jika dibandingkan dengan komunitas lain diluar nelayan. Rendahnya kualitas sumber daya masyarakat nelayan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperoleh

peluang pendidikan.

Sampai saat ini sebagian besar masyarakat nelayan (orang yang hidup dari mata pencaharian memanfaatkan potensi kelautan masih dililit kemiskinan. Jumlah nelayan miskin tersebut diperkirakan mencapai 22 % dari seluruh penduduk miskin di Indonesia, meningkat lebih dari empat kali lipat seiring dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda perekonomian bangsa Indonesia (Bappeda Jateng -Konsultan, 2000). Berbagai fenomena kerusakan lingkungan pesisir dan laut bukan hanya disebabkan oleh industrialisasi tetapi juga seringkali diakibatkan oleh penduduk miskin yang karena keterpaksaan (ketiadaan alternatif mata pencaharian) harus mengeksploitasi sumber daya tersebut yang secara ekologis rentan terhadap kerusakan.

2). Minimnya fasilitas obyek

Kelibatan masyarakat juga banyak disebabkan oleh apatisme masyarakat lokal akan prospek pengembangan obyek bagi kemajuan usahanya. Minimnya fasilitas obyek dapat dipandang sebagai kendala utama kemajuan obyek wisata. Dengan demikian, kepercayaan bahwa obyek wisata akan bermanfaat bagi kehidupannya menjadi menurun.

3). Kurangnya promosi wisata

Perkembangan obyek wisata akan kait mengkait dengan banyaknya kunjungan wisata. Selama ini informasi obyek wisata alam Jepara lebih didominasi oleh pulau Karimunjawa dan pantai Kartini. Sementara obyek wisata pantai Tirta Samudra ini kurang mendapat promosi, meski keaslian dan keunikan pasir putihnya sangat digemari wisatawan.

4). Kurangnya keterkaitan yang saling dukung dari obyek ke obyek.

Perjalanan wisata pada suatu daerah akan lebih menarik dan memberi kemudahan bagi pengunjung bila terdapat route tour yang mudah dan menyenangkan. Sampai saat ini baik kaitan dengan obyek wisata dari daerah terdekat seperti Semarang dan Kudus maupun dari obyek wisata yang ada di Jepara sendiri kurang memberikan informasi pada jalinan antar obyek. Seolah-olah mereka berada sendirian dan saling lepas serta bersaing, bukannya membangun sinergi informasi.

5). Belum optimalnya kinerja manajemen obyek wisata

Pada umumnya obyek wisata di Jepara, termasuk di dalamnya obyek wisata Tirta Samudra ini masih dikelola secara konvensional dan cenderung dengan pengelolaan dengan manajemen pemerintah yang kurang profesional dan kompetitif. Berkesan sekedarnya, dan tidak memiliki visi pengembangan ke depan yang jelas.

Dengan melihat dua sisi kehidupan yakni kehidupan gemerlap pariwisata dan kenestapaan nelayan inilah konsep partisipasi dan pelibatan masyarakat pantai yang sebagian besar hidup sebagai nelayan ini berusaha dikaji. Mungkinkah mereka dapat melihat kemanfaatan obyek wisata untuk kehidupannya, atau mungkinkah dengan himpitan hidupnya mereka bersinergi dengan konsep pengembangan wisata yang sering didesain pemerintah untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat ?

B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Secara lebih tegas masalah pengembangan wisata Pantai Tirta Samudra dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1). Rendahnya kelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata
- 2). Minimnya fasilitas obyek
- 3). Kurangnya promosi pariwisata
- 4). Kurangnya keterkaitan yang saling mendukung dari obyek wisata lain
- 5). Belum optimalnya kinerja manajemen obyek wisata dalam pengembangan obyek

2. Perumusan Masalah

- 1). Bagaimanakah pola partisipasi masyarakat sekitar obyek pada keberadaan obyek wisata pantai Tirta Samudra ?
- 2). Bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata pantai Tirta Samudra, berkait dengan pola partisipasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1). Mendeskripsikan pola partisipasi masyarakat pada keberadaan obyek wisata Tirta Samudra dilihat dari : sikap, manfaat, kebutuhan dan bentuk
- 2). Menyusun format / konsep pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata terkait dengan pola partisipasi, dalam pengembangan obyek wisata Pantai Tirta Samudra.

D. Kegunaan

- 1). Sebagai wahana berpikir sistematis pada pengungkapan problem praktis dalam pengembangan obyek wisata khususnya dari aspek kelibatan masyarakat.
- 2). Sebagai sumbang pikir kepada pihak yang berkepentingan dalam pengembangan obyek wisata Tirta Samudra.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

A.1. Pengembangan Pariwisata

Dalam pengkategorian, pariwisata termasuk dalam industri jasa. Seperti halnya industri lainnya, pariwisata juga memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Bagi Indonesia umumnya dan juga banyak daerah, pariwisata menjadi sektor unggulan untuk peningkatan kemampuan ekonominya.

Kebijakan pembangunan pariwisata secara serius dimulai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional. Kebijakan selanjutnya menyusul berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan pembinaan dalam rangka pengembangan kepariwisataan nasional. Dalam Inpres tersebut disebutkan tujuan pengembangan pariwisata, meliputi:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri sampingan,
- b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia,
- c. Meningkatkan persaudaraan / persahabatan nasional dan internasional.

Untuk memperkuat landasan gerak pengembangan pariwisata, berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah. Pengembangan pariwisata juga ditegaskan dalam setiap GBHN yang disusun. Pada tahun 1993 Pemerintah melalui

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02-IZ.01.02 Tahun 1993 mengeluarkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Tujuan yang mendasari kebijakan tersebut adalah mendukung perkembangan kepariwisataan nasional dalam rangka tahun kunjungan Indonesia dengan menetapkan sebanyak 45 negara yang diberikan BVKS. Ditetapkan 13 bandar udara dan 12 pelabuhan laut sebagai pintu masuk pemegang BVKS. Fasilitas tersebut diberikan pada :

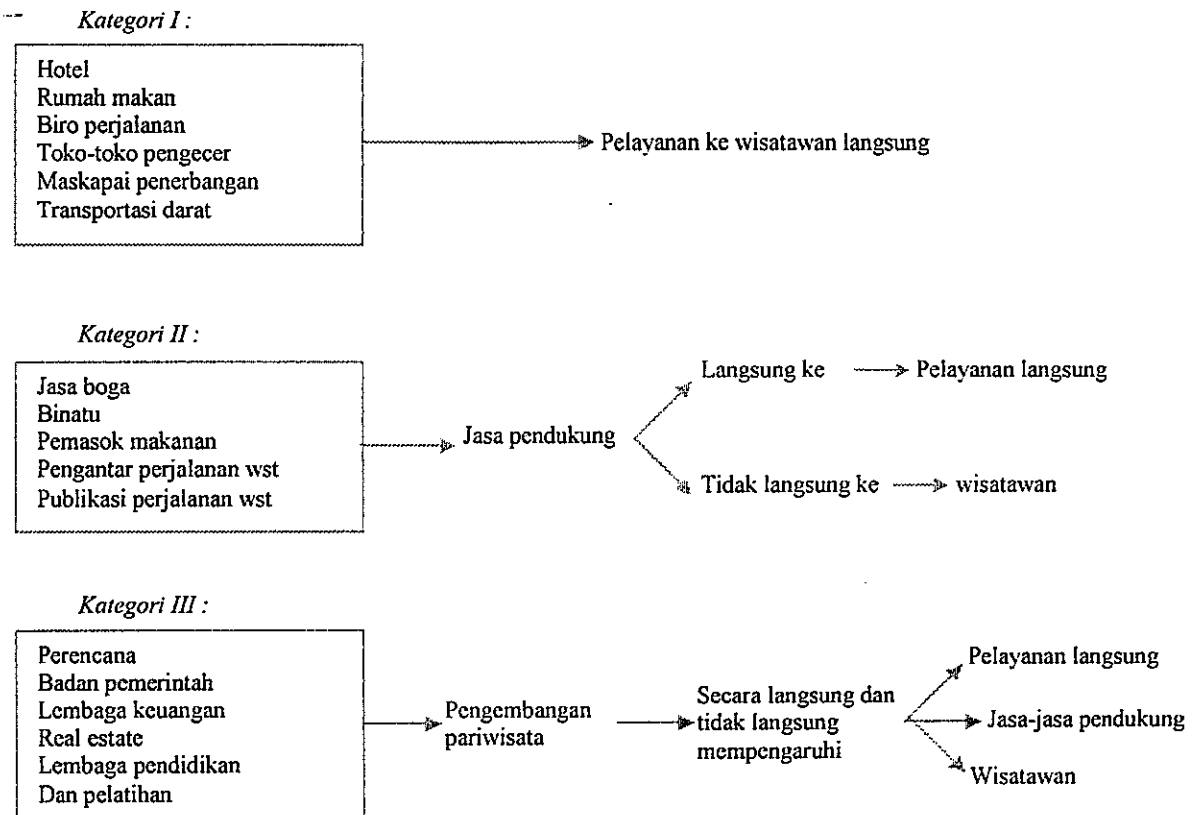
- mereka yang melakukan kunjungan bisnis,
- warga negara yang sedang dalam peninjauan rencana penanaman modal asing di Indonesia,
- mereka yang melakukan kegiatan dalam pemberian ceramah / seminar non komersial.
- mereka yang melakukan kegiatan jurnalistik dan olahraga.

Gerakan dan kegiatan wisata sebagai penguatan pengembangan pariwisata di Indonesia antara lain adalah : pencanangan gerakan sadar wisata tahun 1989 dengan Program Sapta Pesona. Selanjutnya tahun 1991 pariwisata Indonesia menggeliat lagi dengan pencanangan Tahun Kunjungan Wisata (Visit Indonesia Year, 1991).

A.2. Pengembangan Kawasan Wisata : Pelaku dan Dimensi

Pariwisata bukanlah kegiatan yang dapat berdiri sendiri oleh pelaku tunggal, namun melibatkan banyak aktor / pelaku. Pelaku-pelaku usaha jasa wisata ini dapat terkait dengan pelayanan kepada wisatawan secara langsung, maupun tidak langsung. Pelayanan tidak langsung, misalnya toko souvenir,

warung makan yang melayani pekerja wisata maupun wisatawan, jasa telekomunikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan langsung terkait dengan : jasa obyek wisata, atraksi wisata, dsb. Berbagai kegiatan atau perilaku dari pelaku wisata dapat digambarkan dengan pendekatan konsep keterkaitan usaha wisata berikut:



Gambar 1. KONSEP KETERKAITAN PELAKU WISATA

Sumber: Hadinoto. 1996 : 25

Pelaku wisata menurut Hadinoto tersebut dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni:

1. Kelompok yang memberikan pelayanan langsung (direct providers of tourist services) : hotel, rumah makan, biro perjalanan, toko pengecer, maskapai penerbangan, transportasi darat dan sebagainya.
2. Kelompok jasa pendukung (tourism support services): jasa boga, binatu,

pemasok makanan, pengantar perjalanan wisata, dan publikasi perjalanan wisata,

3. Kelompok pengembangan pariwisata (tourism development organization):
perencana, badan pemerintah, lembaga keuangan, perumahan dan lembaga pendidikan dan latihan.

Sementara itu, banyak dimensi sebenarnya juga turut berperan dalam pengembangan I wisata. berikut adalah hasil identifikasi dari berbagai sumber tentang dimensi-dimensi pengembangan pariwisata, antara lain dari : Mile (2000), Hadinoto (1996), Swantoro (2001), Yoeti (1997), Herber dalam Hadinoto (1996), dan Syamsiridjal (1997).

TABEL II.1

DIMENSI-DIMENSI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

NO.	AHLI WISATA	UNSUR WISATA YANG DIKEMUKAKAN
1	Christic Mile (Robert. 2000:26-32)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraksi wisata 2. Fasilitas 3. Transportasi 4. Keramah-tamahan
2	Hadinoto (1996:15)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraksi di destinasi, adalah atraksi yang ditampilkan di daerah tujuan wisata, dan citra yang dihasilkan/diciptakan bagi wisatawan. 2. Fasilitas di destinasi, antara lain: akomodasi, makan, minum, hiburan, rekreasi. 3. Aksesibilitas dari destinasi adalah kemudahan-kemudahan yang dinikmati di daerah tujuan.
3	Suwantoro (2001:54)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, dan bersih. 2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. 3. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka 4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir 5. obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pasir, hutan dan sebagainya 6. obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur, yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia masa lampau
4	Yoeti (1997 : 59)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek wisata itu sendiri harus menarik untuk disaksikan 2. mempunyai kekhususan dan berbeda dari obyek lain 3. prasarana menuju ke tempat tersebut terpelihara dengan baik

		4. tersedianya <i>fasilitas something to see, something to do, something to buy</i> 5. dilengkapi dengan sarana akomodasi dan lain-lain yang dianggap perlu
5	Herber (dalam Hadinoto, 1996 : 21)	1. Atraksi 2. Budaya 3. tenaga kerja 4. prasarana dan sarana 5. transportasi 6. jasa pendukung 7. akomodasi 8. pemasaran
6	Samsuridjal dan Kaelany (1997 : 21)	1. Atraksi 2. mudah dicapai (aksesibilitas) 3. amenitas 4. organisasi wisata (tourist organization) 5. keramah tamahan penduduk 6. tersedianya barang cenderamata

B. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata

B.1. Partisipasi dan Pemberdayaan

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris Participation yang berarti mengambil bagian. Participator dimaknai sebagai "yang mengambil bagian atau sering disebut dalam bahasa umum sebagai keikutsertaan". Selengkapny partisipasi sering dikatakan sebagai peran serta atau keikutsertaan mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Keith Davis (dalam Reksopoetranto, 1992: 13) mengartikan partisipasi sebagai: "...keterlibatan mental / pikiran dan emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggungjawab terhadap usaha mencapai tujuan yang bersangkutan".

Hampir searti dengan pemaknaan di atas, Alport (dalam Sastropetro, 1988:12) menyebutkan bahwa "seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja". Hal tersebut berarti bahwa penggambaran keterlibatan formal dalam

kegiatan saja tidak cukup menggambarkan partisipasi seseorang, tetapi harus dapat diungkap sampai pada kelibatan mental emosional. Sastropetro (1988) selanjutnya menerangkan kaitan antara partisipasi dan pemberdayaan sebagai berikut:

Sejalan dengan konsep partisipasi, dalam pembangunan dikembangkan konsep pemberdayaan masyarakat. Terminologi pemberdayaan (*empowerment*), lawan katanya adalah pelumpuhan (*dis-empowerment*). Untuk lebih mudah memahaminya, istilah yang kini populer dengan "pemberdayaan masyarakat" (*community empowerment*) memiliki makna sebagai proses stimulasi pemberian daya (*power* atau kekuatan) kepada masyarakat untuk mampu berbuat dengan lebih mengandalkan potensi dan kekuatannya sendiri. Lawan katanya "pelumpuhan masyarakat" (*community dis-empowerment*), dimana masyarakat tidak lagi punya daya, power atau kekuatan untuk berbuat sesuatu tanpa ditopang pihak lain sehingga penuh ketergantungan. Oleh sementara orang, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep, sering diartikan sama dengan konsep kontribusi masyarakat (*community contribution*) atau populer dengan "swadaya masyarakat" yang lantas diartikan sumbangan (tenaga, uang atau barang). Ada pula yang menyamaartikan dengan konsep partisipasi masyarakat (*community participation*) dalam pengertian keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat.

Padahal pengertian pemberdayaan masyarakat jauh lebih luas dari dua konsep di atas (sumbangan dan keikutsertaan). Hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mengatur hidupnya, dan mendorong pemerintah untuk melindungi dan memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh hak-haknya (hak sosial, ekonomi, dan politik). Dalam terminology lain, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses pemampuan masyarakat yang meliputi unsur keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab masyarakat. (Bryant, 1989).

Dibutuhkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk

pemampuan dan peluang memperoleh atau memanfaatkan hak-hak tersebut yang harus didorong melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Agar dapat memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya tersebut, masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat mendayagunakan sumber daya yang ada (dari luar terutama pemerintah dan atau terlebih-lebih potensi masyarakat sendiri) secara optimal, demi peningkatan kesejahteraan, martabat, dan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat.

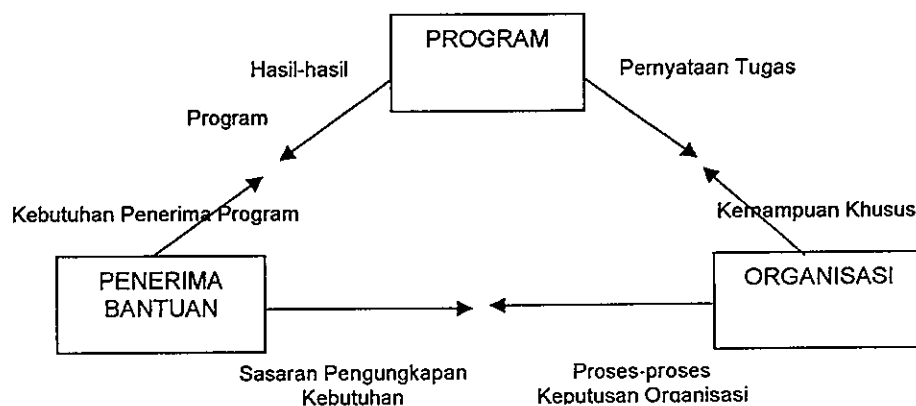
Seiring dengan berkembangnya paradigma baru pemberdayaan masyarakat dan arus reformasi, maka perencanaan pembangunan pun mengalami penyesuaian untuk semakin pro pemberdayaan masyarakat. Menurut Sastropetro (1988), hal ini berarti harus :

1. Memasukkan nilai keterbukaan (transparansi), demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam tahap kebijakan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi), dengan melibatkan semua unsur stakeholders.
2. Mengembangkan forum kelembagaan yang partisipatif-dialogis (participatory public policy), dengan melibatkan masyarakat secara luas.
3. Meningkatkan kapasitas legislatif dan eksekutif (birokrasi pemerintahan) dalam partnership yang setara untuk dapat mengakomodir model-model pemberdayaan masyarakat.

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) merupakan sumber dan inspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (empowerment). Pemberdayaan merupakan salah

satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa "pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat" (Korten, 1984).

David C. Korten (1984) mengemukakan teori pelebagaan program dengan menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (beneficiaries), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program.



Gambar II. 1. Persyaratan Relay akan Program

Sumber : Diadaptasi dari buku People Centered Development (Davie C. Korten and Rudi Klauss, 1984)

Menurut Korten (1984) tersebut, program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila tidak ada hubungan erat / smergis antara:

- kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program

- persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana,
- kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan keuangan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.

Jadi untuk keberhasilan suatu program pengembangan industri kecil diperlukan, *pertama* adanya kesesuaian antara kebutuhan pengusaha dan pengrajin dengan hasil pelaksanaan program, *kedua*, adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana, atau sejauhmana kemampuan organisasi pelaksana dampingan program mengelola atau memenej program bantuan/dampingannya, dan *ketiga*, kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana.

Menurut teori *Stimulus - Needs Respons* (S-N-R), kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Jepara (Stimulus) akan mempengaruhi kebutuhan/Keinginan (needs) para pengusaha usaha jasa wisata, manakala stimulus yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Perhubungan sesuai dengan kebutuhan pengusaha, maka akan timbul respon positif dari pengusaha, sehingga peluang pemberdayaan pengusaha usaha jasa wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Perhubungan akan berhasil.

Pada tingkatan teori menengah (middle range theory) permasalahan dapat dianalisis dengan menggunakan *Fit Theory* atau Teori Kecocokan dari Konen dalam buku Tjokrowinoto (1959) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program yang dilakukan oleh Pemda manakala sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, masyarakat mampu melakukan program/kegiatan, dan terlibat dalam penyusunan program/kegiatan.

Berdasarkan kajian teori di atas terlihat jelas bahwa tingkat keberhasilan/perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dengan kebutuhan para pelaku bisnis wisata atau masyarakat sekitar obyek.

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Jika ekonomi rakyat mendapat dukungan dari pemerintah dan pembinaan secara terpadu terhadap industri kecil, maka akan muncul kebangkitan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan (empowerment) pada awalnya timbul dari adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan (Soecrisno, 1995). Selanjutnya Lukman Sotrisno mengemukakan bahwa paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Kritik yang dikemukakannya adalah paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri dari kelompok mereka sendiri. Model sentralistik tersebut tidak memberi kesempatan para rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pembangunan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

Loekman Sutrisno (1995) melihat pemberdayaan sebagai paradigma pembangunan yang intinya merupakan proses otonomisasi

program pembangunan. Hal tersebut terungkap dalam jabaran berikut:

Pemberdayaan atau empowerment merupakan salah satu strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan berupaya untuk mengolah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri (Loekman Soetrisno, 1995).

Oleh karena itu pembangunan masyarakat yang bersumber pada sumber daya manusia dengan pendekatan yang berakar pada sumber daya manusia dengan pendekatan derivatifnya yang berbentuk pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada komunitas, diharapkan dapat ikut mewujudkan *sustained development* lewat penerapan strategi empowerment.

Konsep *empowerment* sebagai konsep alternatif pembangunan memberikan tekanan pada ekonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi langsung (melalui partisipasi) demokrasi dan pembelajaran sosial pengalaman langsung (Friedmann, 1992). Sebagai titik fokusnya *lokalitas*, sebab *civil society* akan merasa siap diberdayakan lekat dengan *issue-issue* lokal. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat tidak sebatas ekonomi saja, namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki posisi tawar secara nasional maupun internasional.

Segenap upaya pembangunan harus sudah didasarkan pada pencapaian pemerataan atas hasil-hasil pembangunan dan sedapat mungkin memperkecil kesenjangan di masyarakat. Dalam menghadapi liberalisasi

ekonomi, dimana perekonomian berfungsi menurut mekanisme pasar, maka pencapaian target-target pemerataan memperkecil kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial, diharapkan bukan lagi slogan, tetapi sudah merupakan bagian operasional dari setiap kebijakan perekonomian nasional. Hal ini dicapai dengan upaya mengurangi dampak dari pengaruh liberalisasi perekonomian dunia yang tidak terkendali dengan melalui pendekatan pemberdayaan baik individu maupun kelompok masyarakat merupakan salah satu persyaratan pembangunan nasional. Sistem adalah kesatuan antar elemen-elemen (in put, process, out put) yang saling terkait, dimana kerusakan / gangguan pada salah satu elemen sistem akan berpengaruh terhadap elemen yang lainnya secara keseluruhan.

Menurut pandangan teori sistem Dinas Pariwisata dan Perhubungan adalah sebagai sub sistem atau bagian dari sistem yang lebih luas (Pemda, Pasar, Masyarakat, Pengusaha) yang berarti aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah (Dinas terkait) dipengaruhi juga oleh variabel lingkungannya. Kebijakan, strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Perhubungan untuk memberdayakan pelaku usaha bisnis wisata juga dipengaruhi oleh kondisi pelaku usaha itu sendiri, pasar, masyarakat dan yang lainnya.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat (elemen proses) berdasarkan teori sistem dipengaruhi oleh kebutuhan pengusaha usaha jasa wisata (input), manakala terdapat sinergi antara elemen input dan proses akan menghasilkan efektivitas pemberdayaan pengusaha usaha jasa wisata (output). Sementara itu, Kartasmita (1996), menyatakan bahwa

pemberdayaan berarti untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan, Bryant & White (1987). lebih mengartikan pemberdayaan sebagai pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak yang lebih besar kepada si miskin.

Pengertian lain tentang pemberdayaan dari Freire (sebagaimana dikutip Loekman Soetrisno, 1995), bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber alam dan mendorong masyarakat mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang menindas (bpressive). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Moechtar Mas'oed (1994), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Bertolak dari fenomena tersebut **Friedmann (1992)** menawarkan strategi pembangunan yang populer disebut dengan empowerment (pemberdayaan). Lebih lanjut Friedmann mengemukakan bahwa hasil interaksi pada tingkat ideologi antara konsep *growth strategy* dan *people centered* akan melahirkan konsep empowerment atau yang lebih akrab disebut dengan pemberdayaan. Konsep ini muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan dalam artian gagalnya model-model pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang

memadai. Kegagalan dan harapan ini, bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan cerminan nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan semakin terasa pada tingkat individu dan masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat adalah nilai kolektif dari pemberdayaan individu.

Sebagai konsep alternatif pembangunan, empowerment memberi tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, secara langsung melalui partisipasi demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas. Dengan asumsi bahwa *civil society* siap memberdayakan melalui isu-isu lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* diabaikan, karena pemberdayaan tidak semata-mata di bidang ekonomi, tetapi juga secara politik, sehingga masyarakat akan memiliki *bargaining position* secara nasional maupun internasional.

Konsep pemberdayaan ini merupakan hasil dari proses interaktif di tingkat ideologi dan praktis. Ditingkat ideologis, merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up antara growth strategy dan people centered strategy. Di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Konsep ini tidak mempertentangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi bagaimana mensinergikan keduanya. Konsep ini bertitik tolak pada pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk terjadinya

pertumbuhan.

Memperhatikan uraian di atas maka pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang didasari pada semangat *people centered*, dan bercirikan: *participatory, empowering and sustainable* dengan asumsi dasarnya bahwa setiap manusia memiliki potensi, daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, karena pada dasarnya manusia bersifat aktif dalam setiap upaya keberadaannya. Memberdayakan masyarakat dapat mengandung arti mengembangkan, memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Priyono dan Pranarka, 1996 dalam Sedarmayanti, 2000).

Dengan mengacu pada rangkaian konsep di atas, maka konsep pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan dalam dimensi-dimensi berikut:

1. Pelibatan dalam perumusan kebijakan pengembangan
2. Pemberdayaan (pengembangan usaha, pembelajaran akan kemandirian usaha dan penguatan posisi tawar).
3. Kelangsungan hidup.

Henry Pratt Fairchild and Authorities (1982 :78) mengemukakan bahwa "dijumpai suatu konsep *social participation* yaitu suatu keadaan dimana seseorang ikut merasakan bersama-sama dengan orang lain sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial." Hal ini merupakan kesadaran manusia yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk berkelompok atas dasar

kesenangan atau sesuatu yang dirasakan berguna, atas dasar persahabatan dan kasih sayang atau saling mengerti. Dalam kelompok tersebut seseorang menemukan identifikasi pribadinya karena bersama-sama dengan orang lain merasakan kasih sayang, kesetiaan, tanggung jawab bersama dan persahabatan. Kesemuanya ini dapat diperoleh melalui komunikasi dan kegiatan bersama.

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi: kendali (kontrol, pengawasan) motivasi, pengungkapan emosional dan informasi. Tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi: pentransferan makna diantara anggota-anggotanya. Hanya lewat pentransferan makna dari satu orang ke orang lain informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Tetapi komunikasi itu lebih dari sekedar menanamkan makna. Komunikasi harus juga dapat dipahami, dalam suatu kelompok dimana seorang anggotanya hanya berbicara sementara yang lain tidak mengerti apa yang dibicarakan maka dengan sendirinya komunikasi tidak sepenuhnya akan dipahami, sehingga komunikasi harus mencakup pentransferan dan pemahaman makna. Komunikasi juga membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada orang lain apa yang harus dilakukan, seberapa baik yang mereka kerjakan dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang dibawah standart.

Banyak orang keliru memandang bahwa motivasi sebagai ciri pribadi yang dimiliki oleh orang lain sementara yang lainnya tidak memiliki. Dalam praktek di perusahaan sering seorang manajer

mengatakan bahwa karyawan yang tampak kekurangan motivasi sebagai seorang pekerja yang malas. Stigma semacam itu mengandaikan bahwa seorang individu selalu malas jika kurang motivasi.

Menurut Effendi (1981:47) komunikasi dalam pembangunan dapat berhasil jika dalam proses komunikasi, penyuluh dan individu atau kelompok yang dibina saling bekerja sama. Namun keterlibatan penyuluh dan individu atau kelompok ke dalam proses komunikasi sering terjadi dengan sendirinya. Sebab mungkin diantara individu atau kelompok yang dibina terdapat perbedaan-perbedaan dalam daya persepsi dan kemampuan konsepsi, atau mereka berbeda dalam pendidikan dan hubungan sosial.

Untuk memperoleh hasil komunikasi yang efektif dalam penyampaian penjelasan-penjelasan hendaknya disusun menurut taraf perkembangan kemampuan dan taraf pendidikan individu atau kelompok yang dibina. Dapat disimpulkan bahwa memformulasikan rencana, gagasan atau sebuah aktivitas pembangunan secara efektif dipengaruhi: Kemampuan pendidikan dan kondisi sosial.

B.2. Fenomena Penelitian

B.2.1. Pola Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang, satuan-satuan kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan sumbangsih kepada tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab (Keith Davis dalam Reksopoetranto, 1992). Sementara itu pandangan FAO yang diikuti Mikkelsen (2001:64) menunjukkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam

rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut. Pandangan lain dikemukakan oleh Mubyarto (1984) bahwa "partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri".

FAO dan Mubyarto menyepakati bahwa masyarakatlah yang harus dapat membantu dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Hal ini dapat terjadi bila ada keselarasan hubungan antara pengelola program, masyarakat dan juga program itu sendiri seperti juga dikemukakan oleh David C. Korten tentang kesesuaian antara ketiga unsur tersebut dalam bahasan sebelumnya.

Keberhasilan pembangunan dengan demikian sangat tergantung pada keberhasilan pelibatan masyarakat. Bintoro (dalam Rahardjo, 1983) mengemukakan bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut:

1. Keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggungjawab

pembangunan, yang dapat dilakukan dalam sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain

3. Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya Pusic (dalam Adi, 2001), menyatakan bahwa perencanaan pembangunan memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas saja. Menurutnya, partisipasi atau keterlibatan warga dalam pembangunan paling tidak dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

- i. Partisipasi dalam perencanaan, dan
- ii. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi dalam perencanaan mempunyai segi positif adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau menghambat tercapainya keputusan bersama. Partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat besar sukar dilakukan, dan hanya dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalahnya adalah "apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga".

Partisipasi dalam pelaksanaan memiliki aspek positif, yakni sebagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan

program) telah selesai dikerjakan. Sedangkan segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi, dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Dengan demikian warga tidak secara emosional terlibat dalam program pembangunan, yang berakibat kegagalan tidak dapat dihindari. (sementara Bintoro pada penjelasan sebelumnya partisipasi tidak hanya pada perencanaan dan pelaksanaan, tetapi sampai menerima dan memanfaatkan hasil).

Clup Du Sahel (Mikkelsen, 2001) memberikan penjelasan tentang pola/jenis dan pendekatan-pendekatan dalam partisipasi, yakni:

- 1). POLA I : Partisipasi pasif melalui : pelatihan dan informasi, dilakukan dengan pendekatan : "kami lebih tahu apa yang baik bagimu". Partisipasi ini lebih mengedepankan komunikasi satu arah seperti guru dan murid yang diterapkan antara staf proyek dan masyarakat.
- 2). POLA II : Partisipasi Aktif melalui : dilakukan dengan pendekatan pelatihan dan kunjungan. Partisipasi ini mengedepankan dialog dan komunikasi dua arah, memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh dan pelatih dari luar.
- 3). POLA III : Partisipasi dengan keterikatan : dilakukan dengan pendekatan " kontrak, tugas yang dibayar ; "bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu". Masyarakat setempat baik secara pribadi maupun kelompok kecil diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggungjawab atas setiap kegiatan pada masyarakat

atau proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model klasik ke model yang diberi subsidi dimana panitia setempat bertanggungjawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya : dapat dilakukan modifikasi sesuai tujuan yang diinginkan.

- 4). POLA IV : Partisipasi atas permintaan setempat dilakukan dengan pendekatan: kegiatan yang didorong oleh permintaan. Kegiatan berfokus pada : kebutuhan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan pihak luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal, tidak ada anggaran untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana dan struktur proyek. dan tidak ada komando satu arah dari proyek kepada kelompok sasaran. Masalahnya: bagaimana masyarakat setempat dapat memberikan perhatian pada sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya apabila mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi.

Menurut Moelyanto, kondisi yang bisa menimbulkan atau mendukung partisipasi adalah:

- a. Strategi pembangunan yang diarahkan pada bagian masyarakat miskin.
- b. Adanya struktur kepemimpinan yang cocok, karena pemimpin desa mempunyai kepentingan yang sama dengan si miskin sendiri.
- c. Pembentukan kelompok diluar koperasi (kerjasama) yang berbasis pedesaan.

Dari penjelasan di atas dapat memberikan pengertian bahwa pemberian pengarahan tentang pembangunan kepada rakyat miskin akan

mendukung terciptanya partisipasi. Oleh karena itu betapapun partisipasi sangat penting dalam pengembangan sebuah kawasan obyek pariwisata.

Dalam pembangunan tumbuhnya partisipasi masyarakat sering mengalami berbagai kendala dan hambatan antara lain :

- Kurangnya partisipasi yang murni terhadap persamaan sosial
- Kekhawatiran terhadap aksi bersama
- Kurangnya akses kesempatan rakyat
- Pendekatan pembangunan yang terpecah-pecah

Penjelasan mengenai partisipasi yang telah dijabarkan diambil dari para ahli yang kemudian dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara mental dan emosional baik fisik maupun non fisik kepada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh swasta maupun negara dan perasaan ikut bertanggung jawab serta mendukung keberadaannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi ini adalah:

1. kelibatan warga sekitar obyek dalam kegiatan wisata
2. sikap warga pada keberadaan obyek wisata
3. manfaat yang dirasakan warga dari obyek wisata
4. Kebutuhan yang diharapkan didapatkan dari pihak manajemen dalam rangka pengembangan obyek wisata

B.2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang didasari pada semangat people centered, dan bercirikan : participatory, empowering and sustainable dengan

asumsi dasarnya bahwa setiap manusia memiliki potensi, daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, karena pada dasarnya manusia bersifat aktif dalam setiap upaya keberadaannya.

Memberdayakan masyarakat dapat mengandung arti (Priyono dan Pranarka, 1996 dalam Sedarmayanti, 2000):

- mengembangkan.
- memandirikan,
- menswadayakan dan
- memperkuat posisi tawar

masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat sekitar obyek diukur dengan indikator:

1. pengembangan kemampuan ekonomi sekitar obyek wisata
2. upaya menumbuhkan kegiatan pemampuan ekonomi sekitar obyek wisata
3. kemampuan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunannya sendiri
4. penguatan posisi tawar dalam pembangunan di sekitar obyek wisata.

BAB III METODE

PENELITIAN

I A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan pedoman dan langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Rancangan penelitian pada hakekatnya merupakan penggambaran cara-cara yang akan dilakukan seorang peneliti guna memenuhi tujuan studi yang ditetapkan atau dengan kata lain rancangan penelitian merupakan suatu rencana logis untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode survai dan diperkuat dengan in-depth interview. Karena bersifat deskriptif, maka penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesa. Namun demikian, dalam penelitian ini dilakukan analisis kecenderungan keterkaitan antara pola partisipasi dengan konsep pemberdayaan secara kualitatif.

B. Ruang Lingkup

Lingkup fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat sekitar pengembangan obyek wisata Pantai Tirta Samudra Jepara. Partisipasi ini dikaitkan dengan fenomena lain, yakni manfaat yang dirasakan dari obyek, dan juga kebutuhan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pihak pemda atau manajemen obyek wisata.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan sekaligus untuk mempertajam fenomena

sosial yang ingin dikaji sesuai dengan permasalahan yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pantai Tirta Samudra.

Penelitian lokasi penelitian memperhatikan beberapa aspek, seperti kekhususan lokasi, daya jangkau, waktu yang tersedia, dukungan atau kemudahan memperoleh data di lokasi penelitian, efisiensi biaya. Dengan pertimbangan berbagai aspek tersebut penulis menentukan lokasi penelitian pada masyarakat sekitar obyek wisata, yakni Desa Bandengan yang merupakan desa tempat pantai Tirta Samudra berada.

D. Fenomena Penelitian

Suharsini Arikunta (1996 : 99) menyebutkan bahwa "fenomena adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian". Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi warga sekitar obyek
2. Sikap warga terhadap obyek wisata
3. Manfaat yang dirasakan warga dari obyek
4. Kebutuhan yang diharapkan didapatkan masyarakat dari pihak manajemen dalam rangka pengembangan obyek dan pemberdayaan.
5. Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek

1. Definisi Konseptual

- 1). Partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara mental dan emosional baik fisik maupun non fisik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh swasta maupun negara dan perasaan ikut bertanggung jawab serta mendukung keberadaan obyek wisata.

- 2) Sikap warga pada keberadaan obyek adalah kesiapsiagaan mental untuk menerima keberadaan obyek dengan segala aktivitasnya.
- 3) Manfaat dari keberadaan obyek adalah kegunaan dan keuntungan yang dirasakan dari adanya obyek wisata, baik manfaat yang diharapkan maupun manfaat riil yang telah dirasakan.
- 4) Kebutuhan yang diharapkan adalah daftar kebutuhan yang terkait dengan keberadaan dan atau usaha dalam kerangka pengembangan obyek wisata di masa mendatang.
- 5) Konsep Pemberdayaan masyarakat adalah konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata terkait dengan kegiatan utama yang dikembangkan pada obyek wisata tersebut.

2. Definisi Operasional

**Tabel III.1 FENOMENA
PENELITIAN DAN
INDIKATOR**

NO	FENOMENA	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1.	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> Sikap pada obyek wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan mental untuk menerima kehadiran obyek wisata (setuju / positif atau tidak setuju / negatif atas keberadaan obyek wisata)
		<ul style="list-style-type: none"> Manfaat yang dirasakan dari obyek wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Manfaat langsung yang dirasakan Manfaat tidak langsung yang dirasakan Selisih / perbedaan antara manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang dirasakan
		<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan masyarakat dgn adanya obyek wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan yang dirasakan masyarakat akan usaha / keberadaannya dalam kerangka pengembangan
			<ul style="list-style-type: none"> Kecenderungan bentuk-bentuk partisipasi (konsultasi ke pihak manajemen, sumbangan barang /

			<p>uang. Penyupayaan sumbangan dari luar, jasa kerja, kerja sukarela / kerja bhakti, dsb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan jenis-jenis partisipasi (pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, dsb)
2.	Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep pemberdayaan 	<p>a. Pemeliharaan obyek dan lingkungannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pandangan dalam kerusakan alam, penciptaan kenyamanan, dll. • Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata <p>b. Ekonomi masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi pengembangan kemampuan ekonomi • Strategi menumbuhkan usaha baru dan pengembangan obyek • Strategi pelibatan masyarakat dalam membangun kawasannya • Strategi peningkatan posisi tawar usaha wisata masyarakat • Strategi pembangunan yang diarahkan pada masyarakat sekitar obyek • Adanya struktur kepemimpinan yang cocok, yakni pemimpin yang mempunyai kepentingan yang sama dengan masyarakat • Pembentukan kelompok sejenis / koperasi (kerjasama) yang berbasis pedesaan

E. Sumber data

1. Data Primer

Data yang diambil langsung dari responden melalui kuesioner yang dijabarkan dari variabel dan indikatornya serta jawaban dari panduan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan kinerja manajemen obyek wisata.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan kuesioner yaitu kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap variabel-variabel penelitian yaitu partisipasi masyarakat, sikap, manfaat dan kebutuhan serta gagasan / pendapat tentang upaya pemberdayaan masyarakat menurut mereka sendiri. Skala pengukuran akan digunakan skala ordinal dengan 4 kategori.

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Suharsini Arikunto (1998 : 115) mengemukakan bahwa " Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian". Pengertian tentang populasi merupakan keseluruhan obyek atau sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian, dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua keluarga yang berada pada wilayah administratif Desa Bandengan, tern pat obyek wisata pantai Tirta Samudra berada.

2. Sampel

Dalam suatu penelitian, apabila seluruh sumber data atau anggota populasi diteliti atau diungkap informasinya, maka simpulan yang diperoleh dapat dipercaya. Akan tetapi seringkali pengambilan model cacah atau

sensus tersebut tidak dapat dilakukan karena berbagai keterbatasan. Oleh karenanya, dilakukan pengambilan data dengan teknik sampling.

Dalam hal ini seorang peneliti cukup mengambil sebagian dari populasi dengan syarat sifat dan karakternya mewakili populasi, sehingga informasi yang diperoleh dari sebagian populasi tersebut dapat digunakan untuk digeneralisasikan populasinya. Upaya menetapkan sumber data dari populasi diupayakan agar cukup mewakili sifat dan karakteristik. Apabila sampel tersebut benar-benar mewakili populasinya, maka apapun yang diketahui tentang sampel merupakan pengetahuan tentang populasinya juga. Ibnu Hadjar, (1999 : 133) mengemukakan bahwa "sampel adalah kelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian". Sementara menurut Maman Rahman (1993 : 59) "sampel merupakan bagian dari populasi".

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau keterangan mengenai obyek dengan jalan hanya mengambil sebagian dari populasi, Sampel yang diambil diharapkan mampu memberikan gambaran dari keadaan populasi yang sebenarnya dimaksudkan juga untuk berlaku bagi individu lain yang termasuk dalam kelompok populasi (Ibnu Hadjar, 1999:135).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling, dengan kelompok masyarakat sebagai dasar pembuatan cluster (kelompok). Kelompok-kelompok tersebut adalah :

1. Kelompok / *cluster I* : masyarakat yang mempunyai usaha yang terkait langsung dengan kegiatan wisata

2. kelompok / *cluster II* : masyarakat yang mempunyai usaha tetapi tidak terkait langsung dengan kegiatan wisata
3. Kelompok / *cluster III*: masyarakat umum artinya yang tidak memiliki usaha yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kegiatan wisata

Untuk menetapkan besarnya sampel terlebih dahulu kita tetapkan besarnya derajat ketepatan atau *Level Of Significant* dalam penelitian ini adalah 90% dan tingkat 10% error (Moh Nasir, 1988:340). Prinsip pengambilan sampel adalah *representativeness*, atau keterwakilan. Semakin besar jumlah sampel memang semakin baik. Namun demikian, perlu dipertimbangkan aspek kemampuan. Berdasarkan kemampuan peneliti, besar sampel ditetapkan 10 % dari total populasi sebanyak 450 KK, atau sebanyak 45 KK. Selanjutnya, persebaran pengambilan sampel pada setiap kelompok / *cluster* dapat diketahui dari Tabel III.2.

Tabel. III. 2

JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL

NO.	NAMA UNIT KERJA	POPULASI	PERSEN SAMPEL	JUML. SAMPEL
1.	Kelompok usaha terkait langsung	66	10%	7
2	Kelompok usaha tak terkait langsung	180	10%	18
5	Kelompok masyarakat umum	204	10%	20
	Jumlah	450		45

Pemilihan anggota sampel untuk masing-masing bagian/unit dilakukan secara acak atau undian. Dengan cara acak ini setiap subyek memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai sampel. Adapun langkah-

langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Membuat atau memberikan nomor-nomor pada setiap keluarga secara berurutan untuk masing-masing desa.
- b. Setiap nomor keluarga ditulis dalam kertas, kemudian digulung dan dimasukkan dalam kotak.
- c. Mengocok gulungan kertas yang ada dalam kotak agar berbaur secara tidak teratur.
- d. Mengambil satu persatu gulungan kertas tersebut sebanyak sampel yang diperlukan untuk masing-masing desa.

H. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dengan paduan antara wawancara terstruktur dan wawancara dengan panduan wawancara (interview guide).

I. Teknik Analisa Data

1. Analisa tabel tunggal: dilakukan untuk mendeskripsikan secara jelas frekuensi terjadinya fenomena yang terjaring dari pilihan-pilihan jawaban yang dikembangkan dalam daftar pertanyaan.
2. Pengkayaan kualitatif : pada variabel dan indikator diperkaya dengan hasil wawancara mendalam yang disajikan dalam kalimat aslinya.
3. Kategorisasi tabel tunggal: dilakukan untuk dapat lebih mudah menyimpulkan kondisi umum dari sebuah fenomena / variabel amatan.
4. Analisa keterkaitan antar variabel : adalah diskusi lebih lanjut tentang kecenderungan yang ditangkap didialogikan dengan teori, dan amatan kualitatif untuk mencari model / konsep pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

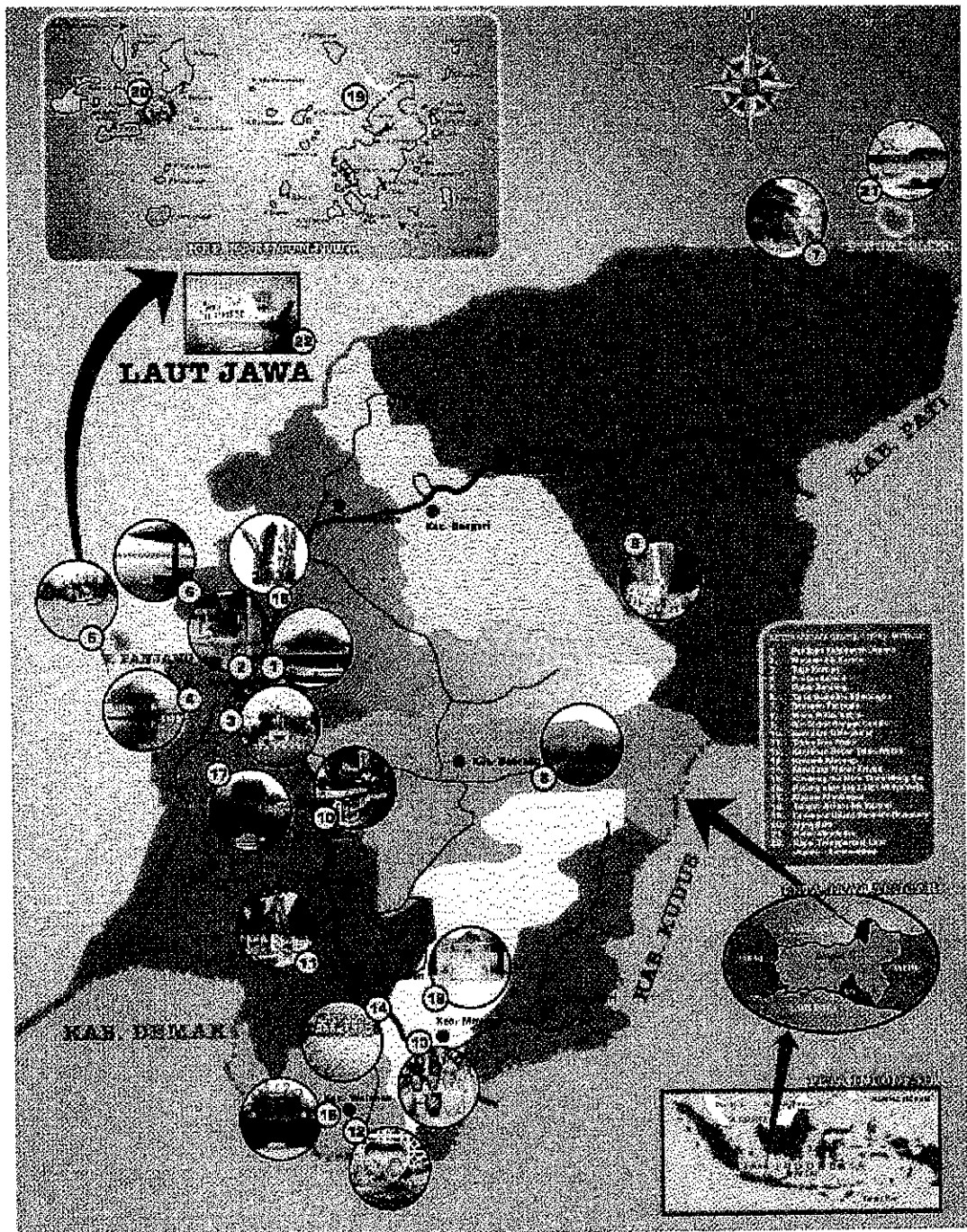
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.I Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara secara geografis berada di wilayah pantai utara, yang dilewati jalan provinsi sepanjang 112,61 km yang menghubungkan Kabupaten Jepara dengan wilayah Kabupaten Demak, Kudus, dan Pati, kemudian juga terdapat jalan Kabupaten sepanjang 703,686 km yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Jepara, sedangkan panjang jalan desa adalah 1.338,08km. Untuk memperjelas gambaran tentang Kota Jepara berikut dibawah ini Peta geografis berikut obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Jepara

Gambar IV.1.Peta Geografis dan Obyek Wisata Kabupaten Jepara



Kabupaten Jepara terletak sekitar 76 km dari Semarang, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kendati berada pada wilayah pantai, namun Kabupaten Jepara

memiliki titik ketinggian setinggi 1.301 m di atas permukaan laut (dpl).

Kabupaten Jepara terletak pada posisi:

- 3° 23' 20" sampai 4° 9' 35" Bujur Timur
- 5° 43' 30" sampai 6° 47' 44" Lintang Selatan

Kabupaten Jepara dibatasi :

- Sebelah Barat : Laut Jawa
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan: Kabupaten Demak.

Secara umum, wilayah Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 21,55° Celcius sampai dengan 32,71° Celcius. Sebagian besar jenis tanahnya adalah jenis Latosol seluas 65.659,97 ha (65,39%). Curah hujan rata-rata Kabupaten Jepara pada tahun 2003 sebesar 2.559 mm per tahun, dengan hari hujan 92 hari.

Wilayah Kabupaten Jepara bervariasi dengan hamparan dataran rendah pada bagian barat sampai dengan utara, dan bagian selatan, serta merupakan dataran tinggi pada bagian tenggara dan bagian timur bagian tengah di sekitar Gunung Merapi.

Kabupaten Jepara berdasarkan data monografi tahun 2003 meliputi wilayah seluas 1.004,132 km², terdiri dari 26,30% tanah sawah dan 73,70% tanah kering, terbagi ke dalam 14 kecamatan dan 194 desa/kelurahan. Adapun pembagian wilayah atas 14 kecamatan tersebut adalah :

Tabel IV. 1

Pembagian Wilayah Kabupaten Jepara Atas Dasar Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Persentase (%)
1.	Kedung	43,063	4,29
2.	Pecangaan	35,399	3,53
3.	Kalinyamatan	24,179	2,41
4.	Welahan	27,642	2,75
5.	Mayong	65,043	6,48
6.	Nalumsari	56,965	5,67
7.	Batealit	88,879	8,85
8.	Tahunan	38,906	3,87
9.	Jepara	24,667	2,46
10.	Mlonggo	102,955	10,25
11.	Bangsri	85,352	8,50
12.	Kembang	108,124	10,77
13.	Keling	231,758	23,08
14.	Karimunjava	71,200	7,09
	Jumlah	1.004,132	100,00

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Tabel IV. 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Keling mempunyai wilayah yang paling luas di Kabupaten Jepara, yaitu 23,08%, yang meliputi 20 desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kedung terdiri dari 18 desa/kelurahan, Kecamatan Pecangaan terdiri dari 12 desa/kelurahan, Kecamatan Kalinyamatan terdiri dari 12 desa/kelurahan, Kecamatan Welahan 15 desa/kelurahan, Kecamatan Mayong terdiri dari 18 desa/kelurahan, Kecamatan Nalumsari terdiri dari 15 desa/kelurahan, Kecamatan Batealit terdiri dari 11 desa/kelurahan, Kecamatan Tahunan terdiri dari 15 desa/kelurahan, Kecamatan Jepara terdiri dari 16

desa/kelurahan, Kecamatan Mlonggo terdiri dari 16 desa/kelurahan, Bangsri terdiri dari 12 desa/kelurahan, Kecamatan Kembang terdiri dari 11 desa/kelurahan, dan Kecamatan Karimunjawa terdiri dari 3 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Jepara pada tahun 2003 tercatat 979.025 jiwa. Kepadatan penduduknya sebesar 975 jiwa per kilometer persegi, artinya luas tanah setiap satu kilometer persegi dihuni oleh 975 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara menurut catatan monografi tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	490.478	50,13
2.	Perempuan	488.547	49,87
	Jumlah	979.025	100,00

Sumber: Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Jepara yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak, yaitu sebesar 50,13 %, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebesar 49,87%. Perbedaan yang relatif kecil ini sangat idial dilihat dari kontribusi masyarakat Kabupaten Jepara dalam hal partisipasinya terhadap sector pariwisata. Posisi laki-laki dan perempuan relatif sama dalam memajukan sector pariwisata.

Sementara itu, komposisi penduduk menurut usia yang terdapat di Kabupaten Jepara menurut data monografi tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3

Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Jepara

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1.	0-4	93.074	9,51
2.	5-9	95.468	9,75
3.	10-14	97.220	9,93
4.	15-19	103.810	10,60
5.	20-24	92.458	9,44
6.	25-29	89.471	9,14
7.	30-34	77.599	7,93
8.	35-39	74.362	7,60
9.	40 - 44	60.787	6,21
10.	45-49	47.718	4,87
11.	50-54	38.939	3,98
12.	55-59	31.237	3,19
13.	60-64	30.813	3,15
14.	65-69	20.362	2,08
15.	70-74	14.825	1,51
16.	75-	10.882	1,11
	Jumlah	979.025	100,00

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut usia di Kabupaten Jepara cenderung berimbang di semua kelompok umur. Dengan komposisi penduduk yang terbesar adalah kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebesar 10,60%. label tersebut juga menunjukkan bahwa struktur piramida penduduk di Kabupaten Jepara adalah piramida penduduk usia muda. Dengan penduduk usia produktif (14 - 60 tahun) sebesar 62,96%, dan usia 20 tahun sampai dengan 65 tahun sebesar 56,51 % sedangkan selebihnya adalah penduduk

usia non produktif. Hal ini berarti peluang Kabupaten Jepara untuk lebih mendayagunakan sumber daya manusia untuk sector pariwisata sangat besar. Andaikata sadar pariwisata ditanamkan untuk angkatan usia produktif tersebut secara optimal, maka Jepara akan mempunyai posisi tawar yang kuat disektor pariwisata regional, nasional dan internasional.

Sebagian besar penduduk usia kerja yang jumlahnya lebih dari 60 % seperti terurai diatasdi pada tahun 2001 sebagian besar bekerja pada sektor industri kerajinan, yaitu sebesar 224.527 jiwa (42%), sektor pertanian sebesar 100.851 jiwa (20%), dan sektor perdagangan sebesar 74.833 (10%). Sedangkan selebihnya bekerja pada sektor jasa, keuangan, bangunan, pertambangan, dan sektor angkutan.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk di wilayah Kabupaten Jepara dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV.4

Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas di Kabupaten Jepara

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	85.395	10,39
2.	Tidak/Belum Tamat SD/MI	173.375	21,10
3.	SD/MI	323.895	39,43
4.	SLTP/MTs	138.361	16,84
5.	SMU/MA	64.778	7,89
6.	SMK	18.603	2,26
7.	D1/D2	4.984	0,61
8.	D3/Sarjana Muda	3.643	0,45
9.	D-IV/S1/S2/S3	8.468	1,03
	Jumlah	821.502	100,00

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Data Tabel IV.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Jepara relatif tergolong masih rendah, di mana menunjukkan mayoritas penduduk di Kabupaten Jepara hanya tamat SD/MI, yaitu sebesar 39,43%. Dan pada urutan kedua, masyarakat Kabupaten Jepara tidak/belum tamat SD/MI, yaitu sebesar 21,10%. Kondisi yang demikian sangat membutuhkan perhatian semua pihak untuk peningkatannya. Dengan tingkat pendidikan yang rendah pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki belum optimal, sehingga pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tidak dengan mudah dapat ditingkatkan.

Dilihat dari agama dan kepercayaan yang dianut, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara memeluk agama Islam, pada urutan kedua adalah pemeluk agama Kristen Protestan, sedangkan pemeluk agama lainnya relatif berimbang. Adapun distribusi agama penduduk di Kabupaten Jepara ini dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.5

Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Jepara

No.	Golongan Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	942.576	97,28
2.	Kristen Protestan	18.794	1,94
3.	Kristen Katholik	2.682	0,28
4.	Hindu	497	0,05
5.	Budha	4.352	0,44
6.	Lainnya	62	0,01
	Jumlah	968.963	100,00

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2000

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Jepara memeluk agama Islam, yaitu sebesar 97,28%. Selanjutnya, berturut-turut sebagian penduduk Kabupaten Jepara lainnya menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu, dan lain-lain. Kondisi yang demikian berakibat pada nuansa kehidupan pariwisata di Kabupaten Jepara sangat diwarnai budaya Islam dan kondisi ini membedakan dunia pariwisata Kabupaten Jepara dengan daerah lain.

Mutasi penduduk di wilayah Kabupaten Jepara selama tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.6

Mutasi Penduduk Tahun 2003 di Kabupaten Jepara

No.	Jenis Mutasi	Jumlah
1.	Kelahiran	8.505
2.	Kematian	4.705
3.	Datang	2.752
4.	Pindah	4.330

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Data tabel IV.6 memperlihatkan bahwa antara jumlah penduduk yang datang dan pindah adalah tidak terdapat keseimbangan; lebih banyak penduduk yang pindah. Namun perbandingan yang sebaliknya terjadi antara angka kelahiran dengan angka kematian, dimana angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Dengan demikian, jumlah penduduk di Kabupaten Jepara cenderung tidak mencolok perubahannya setiap tahun. Berdasarkan data monografi Kabupaten Jepara tahun 2003 saja, tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jepara sebesar 0,23% atau sebesar 2.258 jiwa per tahun; lebih rendah

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,66% atau 5.822 jiwa per tahun. Kondisi konstan demikian ini mempunyai dampak positif terhadap pengembangan pariwisata dan usaha penjagaan lingkungan yang lestari

Dalam bidang pendidikan, secara fisik, Kabupaten Jepara juga telah memiliki fasilitas yang cukup baik, jumlah gedung sekolah, baik TK, SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA, maupun SMK, baik negeri maupun swasta, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.7

Banyaknya Bangunan Sekolah di Kabupaten Jepara Tahun 2003

No.	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	TK	330
2.	SD atau sederajat	764
3.	SLTP atau sederajat	138
4.	SMU atau sederajat	52
5.	SMK atau sederajat	7
	Jumlah	1.291

Sumber: Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Data dari Tabel IV.7 tersebut, tercatat bahwa bangunan gedung sekolah yang berdiri di Kabupaten Jepara berjumlah 1.291 unit. Jumlah tersebut belum termasuk lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ) yang masing-masing berjumlah 461 dan 15 buah.

Sedangkan untuk lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang terdaftar dan berada di Kabupaten Jepara, berdasarkan data monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003, berjumlah 6 (enam) unit, terdiri dari : STIPI, Pelatihan Teknologi Budi

Daya Air Payau, Badan Pengelola Program Studi Ilmu Kelautan (UNDIP), Institut Islam Nahdhatul Ulama (INSNU), Akademi Teknologi Industri Kayu (ATIKA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdhatul Ulama (STIENU).

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan baik formal atau negeri maupun non formal diharapkan dapat ikut menaikkan tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Jepara yang secara umum masih rendah.

Dengan naiknya tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan berdampak terhadap kontribusi masyarakat terhadap sector pariwisata secara keseluruhan. Angka putus sekolah (drop out) di Kabupaten Jepara juga tergolong masih tinggi, dimana pada tahun 2003 saja mencapai angka 1.056 jiwa. Padahal tahun 2001 angka putus sekolah hanya mencapai angka 703 jiwa. Distribusi angka putus sekolah ini dapat dilihat dalam tabel distribusi berikut ini:

Tabel IV.8
Banyaknya Anak Putus Sekolah (drop out)
di Kabupaten Jepara Tahun 2003

No.	Kelompok Sekolah	Jumlah
1.	SD atau sederajat	652
2.	SLIP atau sederajat	116
3.	SMU atau sederajat	208
4.	SMK atau sederajat	80
	Jumlah	1.056

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Berdasarkan Tabel IV.8 di atas, maka dapat dilihat bahwa angka putus sekolah tertinggi ada pada kelompok Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dengan jumlah 652 siswa. Selanjutnya, angka putus sekolah tertinggi kedua ada pada kelompok Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sejumlah 208 siswa. Data yang tersebut dalam Tabel IV.8 belum termasuk lembaga pendidikan agama berupa Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Jepara yang berjumlah 149 unit.

Dalam bidang kesehatan, jumlah sarana pendukung kesehatan, seperti Puskesmas, tergolong sudah cukup merata di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Meski demikian, jumlah Rumah Sakit yang tersedia masih sangat terbatas, dimana baru terdapat di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Jepara dan Kecamatan Pecangaan. Distribusi keberadaan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, serta Balai Pengobatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Jepara pada tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.9

**Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Balai Pengobatan di
Kabupaten Jepara Tahun 2003**

No.	Golongan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	4
2.	Puskesmas	20
3.	Puskesmas Pembantu	44
4.	Balai Pengobatan	12
	Jumlah	80

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Berdasarkan Tabel IV.9 di atas, jumlah Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Jepara adalah 4 unit. Rincian jumlah unit Rumah Sakit tersebut adalah 1 unit Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Jepara, yakni Rumah Sakit Umum (RSU) RA Kartini di wilayah Kecamatan Jepara. Selain itu, 3 unit lainnya merupakan Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta; 2 unit berada di wilayah Kecamatan Jepara, dan 1 unit lagi berada di wilayah Kecamatan Pecangaan. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantu yang secara keseluruhan berjumlah 62 unit, secara umum telah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Yang artinya, di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara telah terdapat Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu. Sedangkan Balai Pengobatan yang berjumlah 12 unit, yang kesemuanya dimiliki dan dikelola oleh swasta baru berada di wilayah Kecamatan Pecangaan, Welahan, Mayong, Jepara, Bangsri, Kembang, dan Karimunjawa. Ketersediaan sarana kesehatan seperti tergambar diatas, diharapkan mampu membantu pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam program-program pemerintah dan usaha-usaha peningkatan taraf hidup termasuk pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat sector pariwisata.

A.2 Gambaran Umum Kecamatan Jepara

Kecamatan Jepara merupakan ibukota Kabupaten Jepara. Secara geografis, batas-batas Kecamatan Jepara adalah :

- Sebelah Barat : Laut Jawa
- Sebelah Utara : Kecamatan Mlonggo

- Sebelah Timur : Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Tahunan
- Sebelah Selatan: Kecamatan Tahunan.

Jadi secara umum, Kecamatan Jepara dikelilingi oleh dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, serta Laut Jawa di sebelah baratnya.

Wilayah Kecamatan Jepara secara umum merupakan hamparan dataran rendah. Sebelah barat wilayah Kecamatan Jepara seluruhnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Kecamatan Jepara berdasarkan data monografi tahun 2003 meliputi wilayah seluas 24,667 km² atau 2,46% wilayah Kabupaten Jepara, dimana sebagian besar merupakan wilayah tanah kering sebanyak 81,85% dan sebagian kecil lagi merupakan tanah sawah sebanyak 18,15% dan wilayah Kecamatan Jepara.

Kecamatan Jepara terbagi ke dalam 5 desa dan 11 kelurahan. Adapun pembagian wilayah atas 16 desa/kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IV.10

Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Jepara

No.	Nama	Desa/Kelurahan
1.	Demaan	Kelurahan
2.	Karangkebagusan	Kelurahan
3.	Potroyudan	Kelurahan
4.	Bapangan	Kelurahan
5.	Pingkol	Kelurahan
6.	Saripan	Kelurahan
7.	Panggang	Kelurahan
8.	Kauman	Kelurahan
9.	Bulu	Kelurahan
10.	Jobokuto	Kelurahan
11.	Ujungbatu	Kelurahan
12.	Bandengan	Desa
13.	Wonorejo	Desa
14.	Kedungcino	Desa
15.	Mororejo	Desa
16.	Mulyoharjo	Desa

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Jumlah penduduk di Kecamatan Jepara pada tahun 2003 tercatat 68.108 jiwa, atau sebesar 6,96% dari jumlah penduduk Kabupaten Jepara. Kepadatan penduduknya sebesar 2.761 jiwa per kilometer persegi, artinya luas tanah setiap satu kilometer persegi dihuni oleh 2.761 jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kecamatan Jepara in jumlah penduduknya merupakan angka tertinggi dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara.

Jumlah penduduk Kecamatan Jepara menurut Catatan monografi tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.11

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Jepara

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	35.644	52,33
2.	Perempuan	32.464	47,67
	Jumlah	68.108	100,00

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Tabel IV. 10 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Jepara yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak, yaitu sebesar 52,33 %, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebesar 47,67%. Angka tersebut tidak begitu menyolok, dan cenderung berimbang, dengan tingkat mobilitas yang konstan kehidupan demografis masyarakat Kabupaten Jepara relatif stabil. Hal ini berakibat positif terhadap pengembangan dan keberlangsungan program-program termasuk program peningkatan sector pariwisata.

Sementara itu, komposisi penduduk, berdasarkan kategori dewasa dan anak-anak, di Kecamatan Jepara menurut data monografi tahun 2003 adalah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.12

Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Jepara

No.	Kelompok	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Dewasa	Laki-laki	25.622	37,63
2.		Perempuan	23.665	34,76
3.	Anak-anak	Laki-laki	9.982	14,68
4.		Perempuan	8.799	12,93
	Jumlah		68.108	100,00

Sumber: Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Tabel IV. 12 diatas menggambarkan penduduk dewasa lebih besar dibanding anak-anak , kondisi yang demikian merupakan peluang positif dalam usaha pengembangan sektor pariwisata. Beban demografis secara umum idial dan cenderung tidak memberatkan untuk masa-masa yang akan dating. Hal ini juga ditopang jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang relatif berimbang. Jumlah penduduk laki-laki relatif sedikit lebih tinggi.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk di wilayah Kecamatan Jepara cukup baik. Angka putus sekolah (drop out) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV.13

**Banyaknya Anak Putus Sekolah (drop out)
di Kecamatan Jepara Tahun 2003**

No.	Kelompok Sekolah	Jumlah	Presentase (%)
1.	SD atau sederajat	43	48,30
2.	SLTP atau sederajat	0	0,00
3.	SMU atau sederajat	22	24,70
4.	SMK atau sederajat	24	27,00
	Jumlah	89	100,00

Sumber: Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Data Tabel IV. 13 menunjukkan bahwa angka putus sekolah (drop out) terbesar di Kecamatan Jepara ada kelompok Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, yakni sebesar 48,30%. Sedangkan pada kelompok Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLIP) atau sederajat tidak terdapat anak yang putus sekolah (drop out). Kondisi anak putus sekolah hanya sebagian kecil masyarakat dibanding total

penduduk di kecamatan Jepara, hal ini menggambarkan sesungguhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, dan hal ini sangat mendukung usaha pelaksanaan dan pengembangan program termasuk pengembangan sector pariwisata.

Berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut, sebagian besar penduduk Kecamatan Jepara memeluk agama Islam, pada urutan kedua adalah pemeluk agama Kristen Protestan, sedangkan pemeluk agama lainnya relatif berimbang. Adapun distribusi agama penduduk di Kabupaten Jepara ini dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.14

Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kecamatan Jepara

No.	Golongan Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	64.487	96,54
2.	Kristen Protestan	1.609	2,41
3.	Kristen Katholik	624	0,93
4.	Hindu	42	0,06
5.	Budha	32	0,05
6.	Lainnya	5	0,01
	Jumlah	66.799	100,00

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2000

Tabel IV.13 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Jepara memeluk agama Islam, yaitu sebesar 96,54%. Selanjutnya, berturut-turut sebagian penduduk Kabupaten Jepara lainnya menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu, dan lain-lain. Kondisi demikian ikut mewarnai nuansa pengembangan sektor pariwisata Kecamatan Jepara, yang lebih bernuansa Islam dalam derap kehidupan sosial kemasyarakatan

Selanjutnya ditinjau dari mutasi penduduk di wilayah Kecamatan Jepara selama tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.15

Mutasi Penduduk Tahun 2003 di Kecamatan Jepara

No.	Jenis Mutasi	Jumlah
1.	Kelahiran	588
2.	Kematian	214
3.	Datang	262
4.	Pindah	387

Sumber : Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

Data tabel IV.14 memperlihatkan bahwa antara jumlah penduduk yang datang dan pindah adalah tidak terdapat keseimbangan; lebih banyak penduduk yang pindah. Namun perbandingan yang sebaliknya terjadi antara angka kelahiran dengan angka kematian, dimana angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Dengan demikian, jumlah penduduk di Kecamatan Jepara cenderung tidak mencolok perubahannya setiap tahun. Kondisi yang konstan seperti pada pertumbuhan masyarakat di tingkat Kabupaten merupakan kondisi positif dalam usaha pengembangan pariwisata dan usaha pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan kondisi obyek-obyek wisata terjaga kemurnian dan keindahannya.

Selanjutnya untuk bidang pendidikan, secara fisik, Kabupaten Jepara juga telah memiliki fasilitas yang cukup baik, jumlah gedung sekolah, baik TK, SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA, maupun SMK, baik negeri maupun swasta, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.16

Banyaknya Bangunan Sekolah di Kecamatan Jepara Tahun 2003

No.	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	TK	27
2.	SD atau sederajat	47
3.	SLTP atau sederajat	9
4.	SMU atau sederajat	5
5.	SMK atau sederajat	4
	Jumlah	92

Sumber: Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2003

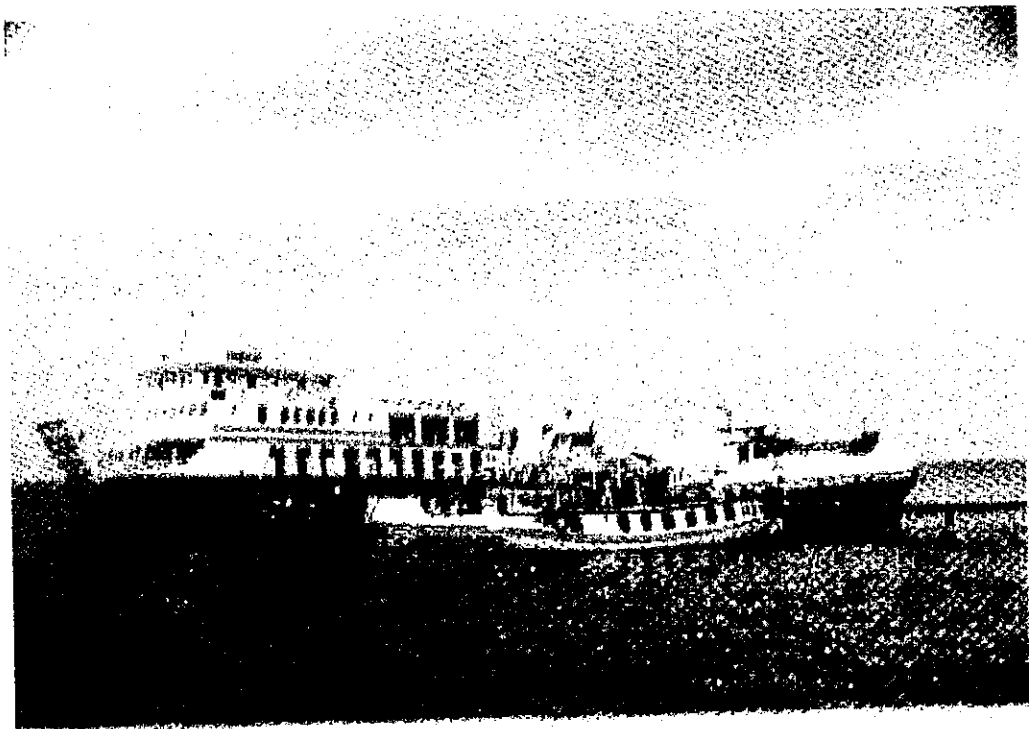
Data dari label IV. 15 tersebut, tercatat bahwa bangunan gedung sekolah yang berdiri di Kecamatan Jepara berjumlah 92 unit. Jumlah tersebut belum termasuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) berjumlah 25 buah. Sarana dan fasilitas pendidikan yang relatif cukup secara kuantitas dan kualitas merupakan asset yang sangat diperlukan dalam usaha pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata

Pusat pemerintahan serta perekonomian di Kabupaten Jepara, hampir sebagian besar terpusat di Kecamatan Jepara ini. Di Kecamatan Jepara inilah terletak Pelabuhan Laut (dermaga) Kartini yang menjadi jalan penghubung bagi Kecamatan Kepulauan Karimunjawa yang terletak di tengah Laut Jawa, yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, yang berjarak + 83 km sebelah utara Jepara. Berikut ini gambar Dermaga pantai Kartini dan Dermaga Karimunjawa.

Gambar IV.2a. DERMAGA PANTAI KARTINI



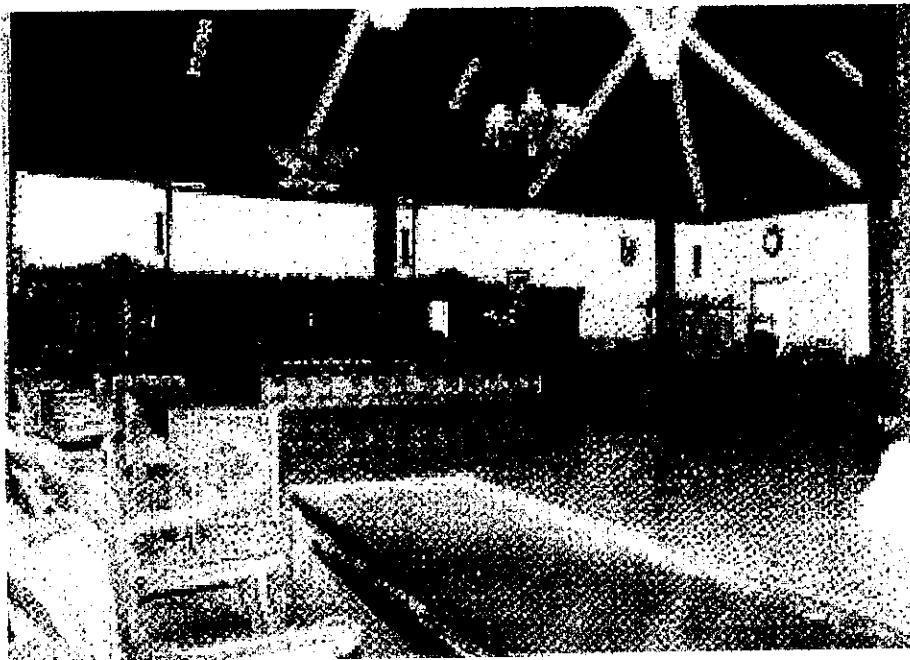
Gambar 2b DERMAGA KARIMUNJAWA



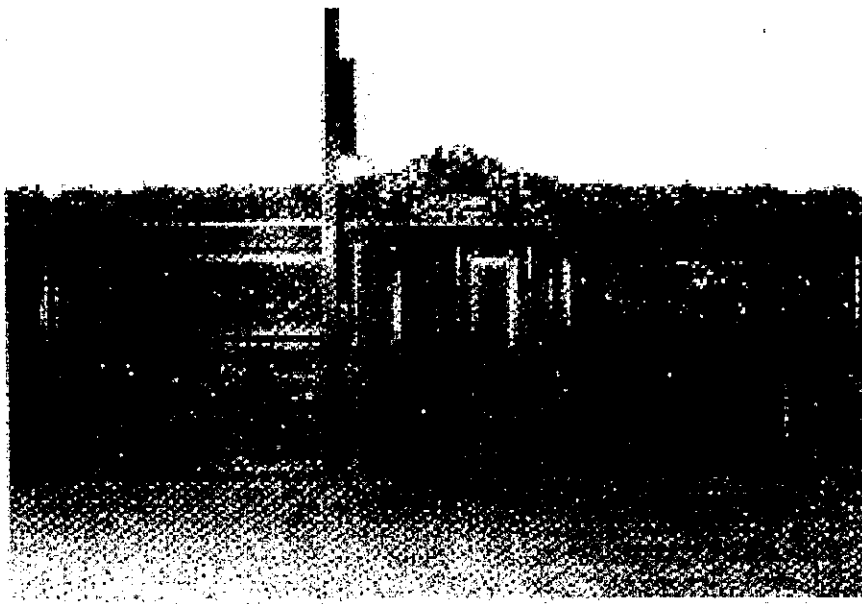
Di wilayah Kecamatan Jepara terdapat beberapa objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Jepara. Beberapa diantaranya adalah Pantai Kartini, dimana juga terdapat Dermaga Kartini (gambar tersebut diatas, gambar 2) Museum Kartini, dan Pantai Tirta Samudra Jepara yang terletak di wilayah Desa Bandengan.

Berikut ini fisualisasi obyek-obyek Musium Kartini yang terdapat di “mdalem kadipaten”

Gambar IV. 3. BEBERAPA OBYEK MUSIUM KARTINI (yang terdapat di ndalem Kadipaten)



Ruang Pendopo Agung



Rana Keputren, Ukiran Tembus/Trawangan



Ruang Pingit RA Kartini



Ruang Paringgitan



Ruang Keramat Pingit RA Kartini

A.3 Gambaran Umum Desa Bandengan

Desa Bandengan merupakan salah satu wilayah desa yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Jepara, dimana di Desa Bandengan ini terdapat salah satu objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Jepara, yaitu Pantai Tirta Samudra.

Desa Bandengan berada sekitar 5 km sebelah utara pusat kota Jepara. Desa Bandengan dibatasi:

- Sebelah Barat : Laut Jawa
- Sebelah Utara : Desa Kedungcino
- Sebelah Selatan : Desa Kedungcino.

Desa Bandengan berdasarkan data monografi tahun 2003 meliputi wilayah seluas \pm 716,103 ha, terdiri dari 93 ha sawah tadah hujan, 493,449 ha tegalan/ladang, 44 ha tanah rawa, 49 ha lahan pasang surut, dan sisanya 36,654 ha merupakan kas desa.

Jumlah penduduk di Desa Bandengan pada tahun 2003 tercatat 5.843 jiwa. Jumlah penduduk Desa Bandengan menurut catatan monografi Desa Bandengan Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.17

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Bandengan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	2868	49,10
2.	Perempuan	2975	50,90
	Jumlah	5843	100,00

Sumber : Data Monografi Desa Bandengan 2003

Tabel IV.16 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Bandengan yang berjenis kelamin perempuan sedikit lebih banyak, yaitu sebesar 50,90%,

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 49,10%. Kondisi perbandingan penduduk berdasar jenis kelamin ini juga relatif berimbang, seperti kondisi di wilayah Kecamatan Jepara dan Kabupaten Jepara, bedanya komposisi penduduk perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.

Sementara itu, komposisi penduduk menurut usia yang terdapat di Desa Bandengan menurut data monografi tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.18

Komposisi Penduduk Menurut Usia di Desa Bandengan

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	0-4	617	10,56
2.	5-9	463	7,92
3.	10-14	512	8,76
4.	15-19	558	9,55
5.	20-24	730	12,50
6.	25-29	763	13,06
7.	30-39	768	13,14
8.	40-49	726	12,42
9.	50-59	441	7,55
10.	60+	265	4,54
	Jumlah	5.843	100,00

Sumber: Data Monografi Desa Bandengan Tahun 2003

Tabel IV.17 menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut usia di Desa Bandengan cenderung berimbang di semua kelompok umur. Dengan komposisi penduduk yang terbesar adalah kelompok umur 30 - 39 tahun, yaitu sebesar 13,14%. Meski demikian, jumlah penduduk usia lanjut cenderung sangat sedikit jumlahnya. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa struktur piramida penduduk di Desa Bandengan adalah piramida penduduk usia muda. Dengan

penduduk usia produktif (14-60 tahun) sebesar 68,22%, sedangkan selebihnya sebanyak 31,78% adalah penduduk usia non produktif. Komposisi penduduk yang demikian sungguh sangat menguntungkan , usia muda dan produktif akan sangat mendukung pelaksanaan program-program dan kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan termasuk sektor pariwisata kalau potensi tersebut bias dikelola secara positif dan perarah sesuai program yang telah dirancang dalam rangka perbaikan taraf hidup masyarakat dan program pembangunan wilayah.

Sebagian besar penduduk usia kerja di Desa Bandengan pada tahun 2003 bekerja pada sektor industri kerajinan. Distribusi pekerjaan penduduk Desa Bandengan lainnya dapat dilihat seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.19

Mata Pencaharian Penduduk Desa Bandengan

No.	Mata	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani sendiri	85	1,45
2.	Buruh Tani	252	4,31
3.	N e l a y a n	154	2,64
4.	Pengusaha	35	0,60
5.	Buruh Industri	2.447	41,88
6.	Buruh Bangunan	63	1,08
7.	Pedagang	28	0,47
8.	Pengangkutan	67	1,15
9.	PNS/TNI/Polri	67	1,15
10.	Pensiun	15	0,26
11.	Lain-lain	2.630	45,01
	Jumlah	5.843	100,00

Sumber : Data Monografi Desa Bandengan Tahun 2003

Berdasarkan Tabel IV.18 di atas, terlihat secara jelas bahwa mayoritas penduduk Desa Bandengan berprofesi sebagai buruh industri, yang berjumlah

41,88%, yang bekerja di industri-industri kerajinan, seperti mebel, furniture, dan lain sebagainya. Profesi yang demikian perlu ditingkatkan kualitas dan ketahanannya, sehingga pada akhirnya akan memiliki daya saing yang tinggi.

Sedangkan berdasar tingkat pendidikan penduduk di Desa Bandengan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV.20

Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 5 Tahun Keatas di Desa Bandengan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	1.219	20,86
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	2.575	44,07
3.	Tidak Tamat SD/ sederajat	34	0,58
4.	Tamatan SD/ sederajat	797	13,64
5.	Tamatan SLTP/ sederajat	649	11,11
6.	Tamatan SLTA/ sederajat	498	8,52
7.	Tamat Akademi/ Perg. Tinggi	71	1,22
	Jumlah	5.843	100,00

Sumber: Data Monografi Desa Bandengan Tahun 2003

Data Tabel IV.19 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Bandengan relatif tergolong masih rendah. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa tamatan SLTA/ sederajat jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tamatan SLTP/ sederajat, apalagi bila dibandingkan dengan tamatan SD/ sederajat. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus serius diperhitungkan untuk ditingkatkan, sehingga dimasa mendatang kualitas sumberdaya secara keseluruhan dapat meningkat lebih baik. Sebagian besar penduduk Desa Bandengan memeluk agama Islam dan sebagian kecil lainnya memeluk agama Kristen Katholik. Adapun distribusi agama penduduk di Kabupaten Jepara ini dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.21

Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang dianut di Desa Bandengan

No.	Golongan Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	5.823	99,66
2.	Kristen Protestan	0	0,00
3.	Kristen Katholik	20	0,34
4.	Hindu	0	0,00
5.	Budha	0	0,00
	Jumlah	5.843	100,00

Sumber: Data Monografi Kabupaten Jepara Tahun 2000

Tabel IV.20 menunjukkan bahwa di Desa Bandengan hanya terdapat 2 kelompok agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen Katholik. Dimana mayoritas merupakan agama Islam hingga mencapai 99,66%. Warna yang demikian senada dengan kondisi Kabupaten Jepara dan Kecamatan Jepara, sehingga nuansa Islam masih terus dominan dalam pengembangan pariwisata.

Kalau ditinjau dari mutasi penduduk di wilayah Desa Bandengan selama tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.22

MUTASI PENDUDUK DESA BANDENGAN

No.	Jenis Mutasi	Jumlah
1.	Kelahiran	3
2.	Kematian	1
3.	Datang	0
4.	Pindah	2

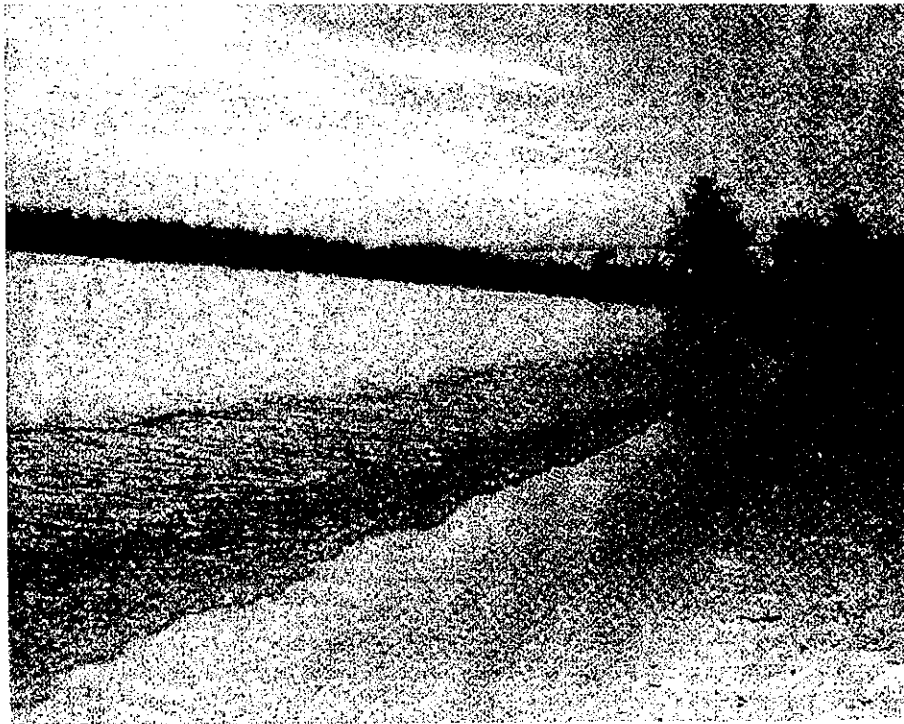
Sumber: Data Monografi Desa Bandengan Tahun 2003

Data tabel IV.6 memperlihatkan bahwa antara jumlah penduduk yang datang dan pindah tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dimana sepanjang tahun 2003 hanya terdapat 3 kelahiran dan 1 kematian serta 2 orang yang pindah keluar dari Desa Bandengan. Kondisi kontan demikian relatif sama dengan Kabupaten Jepata dan Kecamatan Jepara, dan mempynyai kontribusi positif terhadap pengembangan wilayah dan sektor pariwisata.

A.4. Pantai Tirta Samudra

Pantai Tirta Samudra lebih dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan "Pantai Bandengan". Pantai Tirta Samudra terletak + 7 km sebelah utara dari pusat kota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Tak jarang para wisatawan yang datang ke obyek ini sengaja melakukan mandi laut. Pada umumnya mereka yang berkunjung ke obyek wisata ini adalah anak-anak, remaja, dan juga wisatawan mancanegara. Biasanya saat yang disukai untuk mengunjungi Pantai Tirta Samudra ini adalah pagi hari dan di saat sore hari menjelang senja dimana akan tampak panorama sunset (matahari terbenam) yang memukau. Berikut ini gambaran Pantai Tirta Samodra dengan pasir putihnya ;

Gambar IV.4 PANTAI TIRTA SAMODRA



Di Pantai Tirta Samudra ini pengunjung atau wisatawan dapat bersantai ria atau sekedar duduk-duduk di atas shelter sambil menikmati semilir angin pantai serta udara yang masih alami; tanpa polusi. Gambar berikut menunjukkan keasyikan masyarakat menikmati indahnya pantai yang bernuansa pasir putih.

Gambar IV. 5 PENGUNJUNG PANTAI YANG ASYIK DENGAN NUANSA
PASIR PUTIH

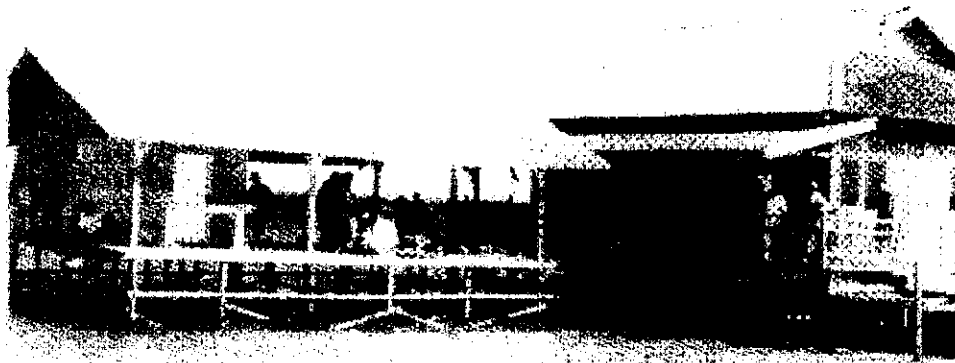


Kawasan Pantai Tirta Samudra yang masih memiliki lahan yang cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon-pohon pandan ini memang cocok untuk kegiatan remaja seperti kemah, bermain bola voli pantai, sepeda santai, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu pula, di dalam area obyek wisata ini sering digunakan ajang permainan motocross dan pertunjukan festival layang-layang, baik regional, nasional, maupun internasional.

Pantai Tirta Samudra dapat dijangkau dengan mudah oleh kendaraan umum, sebab sudah tersedia prasarana jalan yang sudah beraspal dan sudah tersedia pula angkutan kota yang langsung menuju lokasi obyek wisata tersebut dari pusat kota Jepara. Sedangkan

umum, sebab sudah tersedia prasarana jalan yang sudah beraspal dan sudah tersedia pula angkutan kota yang langsung menuju lokasi obyek wisata tersebut dari pusat kota Jepara. Sedangkan makanan khas yang dapat dinikmati oleh para wisatawan yang mengunjungi Pantai Tirta Samudra ini adalah kerang rebus, rajungan, ikan bakar, serta pindang srani. Berikut ini nuansa rumah makan apung dengan cita rasa makanan khas andalannya.

Gambar IV. 6 RUMAH MAKAN APUNG DI TENGAN LAUT



Sejarah dan Legenda "Pantai Bandengan"

Menurut catatan sejarah, "Pantai Bandengan" ternyata masih terkait erat dengan kehidupan pahlawan nasional yang juga tokoh emansipasi wanita, yaitu R.A. Kartini. Pantai Bandengan ini merupakan tempat yang menarik yang menjadi kenangan manis bagi putra-putri Bupati Jepara kala itu, Adipati Citro Wirokusumo I, yang merupakan

ayah dari R.A. Kartini. Kartini kecil yang mendapat panggilan "Trinil" ini semasa kecilnya sering sekali berwisata ke Pantai Bandengan bersama keluarganya sambil bermain-main di tepi pantai yang berhamparan pasir putih. Hati dan jiwa R.A. Kartini seakan-akan telah menyatu dengan deburan obyek laut ini, sehingga sering digambarkan lewat surat-surat Kartini kepada sahabatnya, Stella, di negeri Belanda, bangsawan Belanda, yaitu Ny. Ovink Soer (istri asisten residen) bersama suaminya, saat liburan menjelang

kenaikan kelas, mengajak R.A. Kartini beserta adik-adiknya, Roekmini dan Kardinah, untuk menikmati keindahan pantai bandengan ini. R.A. Kartini dan kedua adiknya mengikuti Ny. Ovink Soer mencari kerang sambil berkejaran menghindari ombak yang menggapai kaki mereka. Ny. Ovink Soer bertanya kepada R.A. Kartini, "Apa nama pantai ini?". Kemudian dijawab dengan singkat oleh R.A. Kartini, "Pantai Bandengan". Kemudian Ny. Ovink Soer mengatakan bahwa di Holland pun ada pantai yang hampir sama dengan Pantai Bandengan, hanya saja ada sedikit perbedaan, bahwa airnya dingin, namanya SCHEVENINGEN. Secara spontan R.A. Kartini menyela, "... kalau begitu, kita sebut saja... Pantai Bandengan ini dengan 'KLEIN SCHEVENINGEN'". Untuk mengenang kembali akan keagungan nya berikut gambar RA Kartini dan suaminya.

Gambar IV. 7 R.A. KARTINI DAN SUAMINYA ADIPATI DJAYANINGRAT



Berawal dari cerita tersebut di atas, maka sampai sekarang Pantai Bandengan terkenal dengan sebutan KLEIN SCHEVENINGEN. (Bahasa Belanda : KLEIN berarti pantai; dan SCHEVENINGEN merupakan nama sebuah pantai di Belanda).

Selain Pantai Bandengan merupakan tempat yang pernah mengukir sejarah perjalanan cita-cita R.A. Kartini. Di pantai inilah R.A. Kartini dan Mr. Abendanon mengadakan pembicaraan empat mata yang berhubungan dengan permohonannya unruk belajar ke negeri Belanda, meskipun akhirnya secara resmi permohonannya kepada Pemerintah Hindia-Belanda ditarik kembali dan biaya yang sudah disediakan bagi R.A. Kartini diberikan kepada seorang pemuda yang berasal dari Sumatra, yaitu Agus Salim (K.H. Agus Salim).

Di samping itu, dikisahkan pula bahwa obyek wisata Pantai Bandengan masih memiliki keterkaitan dengan legenda asal-usul Kepulauan Karimunjawa. Dalam legenda itu disebutkan bahwa karena terdorong rasa prihatin akan perilaku anaknya yang nakal/bandel, maka Sunan Muria memerintahkan putranya, yaitu Amir Hasan, untuk pergi ke utara menuju sebuah pulau yang nampak "kremun-kremun" dari puncak Gunung Muria. Kepergian ini dengan tujuan untuk memperdalam sekaligus mengembangkan ilmu agama Islam. Kelak pulau yang dituju itu dinamakan Pulau Karimunjawa. Dalam perjalanan itu sampailah mereka di pantai yang banyak terdapat paya-paya dan ikan bandeng. Nama ikan inilah yang kemudian diambil menjadi nama desa di wilayah pantai ini, yakni Desa Bandengan.

Dan data Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Jepara, diperoleh data bahwa Pantau Tirta Samudra ini merupakan salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Jepara setelah Pantai Kartini. Dilihat dari aspek pendapatan, Pantai Tirta Samudra ini pun cukup mendatangkan keuntungan. Dari data yang ada, pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Jepara dari berbagai obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Jepara, Pantai Tirta Samudra menduduki peringkat kedua setelah Pantai Kartini, dengan total pendapatan sebesar Rp 101.245.900,- pada tahun 2001.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Pantai Tirta Samudra ini, pada tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengalokasikan dana sebesar Rp 72.000.000,- bagi pengelolaan pantai ini.

Sepanjang tahun 2003, tercatat wisatawan yang mengunjungi Pantai Tirta Samudra mencapai 86.345 orang, dengan rincian 84.486 (97,85%) wisatawan domestik

dan 1.859 (2,15%) wisatawan mancanegara, dengan total pendapatan sebesar Rp 182.198.300,-

B. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh fakta-fakta dari sumber informasi yang berkait dengan topik penelitian. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban informan atas pertanyaan yang telah diajukan. Daftar pertanyaan ini diajukan kepada 45 responden dari masyarakat Desa Bandengan.

Data akan disajikan dalam bentuk tabel tunggal agar lebih jelas menggambarkan jawaban responden yang meliputi:

- Identitas Responden
- Pola Partisipasi
- Pemberdayaan

C. Identitas Responden

1. Berdasarkan jenis kelamin responden, maka diperoleh fakta sebagai table berikut :

Tabel IV.23 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	27	60%
2	Perempuan	18	40%
Total		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.2

Berdasarkan table IV. 22 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki mencapai angka 60% (27), yang berarti lebih besar dari jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 40% (18). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan masyarakat khususnya usaha, masih banyak didominasi oleh laki-laki. Namun, data dapat menjelaskan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan usaha sudah cukup tinggi, yaitu sebanyak 40% (18). Tingginya angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki di wilayah Desa Bandengan dalam mengembangkan kemampuan dirinya dan perannya pada peningkatan ekonomi keluarga sudah cukup berkembang.

Selanjutnya berdasar umur responden , dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel IV.24

Sebaran Responden Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-30	11	24,44
2	31-40	18	40,00
3	41-50	8	17,78
4	51-60	7	15,56
5	>60	1	2,22
	Total	45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.3

Berdasar tabel IV.23 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kelompok umur usia produktif yaitu antara 21-60 tahun yaitu sebanyak

87,3% (44). Responden yang tidak pada kelompok usia produktif mencapai angka 2% (1), yaitu pada kelompok usia lebih dari 60 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa responden sebagai kelompok usia produktif dapat memberi gambaran pada masalah penelitian yaitu pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata Pantai Tirta Samudra. Gambaran masalah diharapkan diperoleh lebih baik dikarenakan dalam usia produktif, kemampuan masyarakat khususnya dalam sikap, baik dalam aspek kognitif, afektif dan konasinya telah berkembang baik. Sehingga, pemahaman masalah dalam penelitian diharapkan dapat diperoleh lebih mendalam dari responden.

3. **Pekerjaan Responden.** Dilihat dari jenis pekerjaan responden, maka akan diperoleh fakta sebagai berikut

Tabel IV.25

Sebaran Responden Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pedagang	14	31,11
2	Jasa	8	17,78
3	Petani	3	6,67
4	Pengrajin	5	11,11
5	Buruh	10	22,22
5	Pegawai Swasta	1	2,22
6	Pegawai Negeri	1	2,22

7	Lain-lain	3	6,67
Total		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.4

Berdasar table IV. 24 di atas diperoleh fakta bahwa bahwa mayoritas responden berada dalam kelompok usaha berdagang yang mencapai 31,11% (14). Tingkat variasi usaha dagang masyarakat cukup tinggi, dari souvenir, kelontong, pedagang makanan, hingga pakaian. Sedang kegiatan usaha masyarakat selanjutnya yang banyak ditekuni oleh masyarakat adalah usaha jasa yang mencapai angka 17,78% (8). Usaha jasa yang telah dikembangkan masyarakat antara lain seperti sewa pelampung, sewa perahu, dan telekomunikasi. Sedang usaha pengrajin mencapai angka 11,11%(5) menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bandengan telah merintis sektor kerajinan masyarakat yang mana menjadi ciri khas dan salah satu pendapatan utama Kabupaten Jepara.

4. Berdasarkan jarak tempat tinggal responden dari obyek, diperoleh fakta sebagai berikut :

Tabel IV.26

Sebaran Responden Menurut Jarak Tempat Tinggal dari Obyek

No	Jarak	Jumlah	Persentase
1	1 km<	10	22,22
2	1,01 km -2 km	20	44,44
3	2,01 km -3 km	12	26,67
4	3,01 km -4 km	3	6,67
5	4,01 km -5 km	-	0
Total		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.6

Berdasar tabel IV.25 di atas maka menunjukkan bahwa jumlah responden yang bertempat tinggal di wilayah Desa Bandengan dalam kisaran 1,01 km - 2 km mencapai angka tertinggi yaitu 44,44% (20). Sedang jumlah tertinggi selanjutnya sebanyak 26,67% (12), yaitu responden yang berada dalam kisaran 2,01km-3km.

Mayoritas responden bertempat tinggal dalam lingkungan Pantai TirtaSamudra juga diharapkan dapat memberi gambaran masalah penelitian secara lebih baik. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kedekatan geografis dan emosional dengan sehingga juga dapat memberi gambaran penelitian secara lebih mendalam.

5. Berdasarkan lama tinggal responden di Desa Bandengan, maka berikut ini sebarannya dapat dilihat dalam table dibawah :

Tabel IV.27

Sebaran Responden Menurut Lama Tinggal

No	Kelompok	Jumlah	Persentase
1	<10 tahun	1	2,22
2	10tahun-20tahun	3	6,67
3	21 tahun - 30 tahun	10	22,22
4	31 tahun - 40 tahun	18	40,00
5	41 tahun- 50 tahun	5	11,11
5	51 tahun - 60 tahun	7	2,22

6	>60 tahun	1	15,56
	Total	45	2,22

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.7

Berdasar tabel IV.26 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan lama tinggal tertinggi adalah pada kelompok 31-40 tahun yang mencapai angka 40%(18). Sedangkan angka tertinggi selanjutnya adalah masyarakat dengan lama tinggal pada kisaran 21-30 tahun yang mencapai angka 22,22% (10).

Berdasar data di atas maka dapat disimpulkan bahwa responden yang terpilih dapat memberi gambaran yang lebih baik dikarenakan mereka cukup lama tinggal di wilayah Desa Bandengan. Responden yang cukup lama tinggal di wilayah Pantai Tirta Samudra akan dapat mengenal kondisi Pantai Tirta Samudra sehingga dapat menjelaskan masalah yang menjadi obyek penelitian.

D. Fenomena Penelitian

1. Dalam penelitian ini fenomena yang akan diamati dan diteliti yang pertama adalah Pola Partisipasi, dan pola partisipasi ini akan dirinci dalam item-item sebagai berikut :

a. Sikap, item ini juga akan dirinci lagi sebagai berikut :

1). Tingkat Kesenangan Masyarakat Pada Keberadaan Wisata Tirta

Samudra, Berdasarkan tingkat kesenangan masyarakat terhadap keberadaan tempat wisata Tirta Samudra dapat diperoleh fakta sebagai table berikut :

Tabel IV.28

Tingkat Kesenangan Masyarakat Pada Keberadaan Wisata Tirta Samudra

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	13	28,89
2.	Setuju	32	71,11
3.	Kurang Setuju	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.8

Berdasar Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan sangat setuju/setuju pada usaha pengembangan wisata Tirta Samudra.

Tingginya tingkat kesenangan masyarakat pada usaha pengembangan wisata Tirta Samudra dikarenakan masyarakat meyakini bahwa pengembangan wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini seperti disampaikan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa:

" Kalau Pantai Bandengan dikembangkan lagi saya sangat setuju...Semoga kalau Pantai Bandengan dikembangkan lagi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk saya....Lebih-lebih, fasilitas yang ada masih kurang.."(Didik Siswanto, 33 tahun)

Informan lain yang memiliki kegiatan produksi furniture menyatakan bahwa:

" Saya pasti setuju jika Pantai Bandengan dikembangkan lagi,...Saya mengharapkan Desa Bandengan semakin ramai dan terkenal,...sehingga dapat meningkatkan usaha saya...apalagi klien saya yang dari luar negeri dapat lebih mengenal Desa Bandengan. "(Supriyanto, 35 tahun)

Wujud rasa senang pada keberadaan wisata Pantai Tirta Samudra ada dalam ikut membuka dan atau mengembangkan kegiatan usaha dalam wilayah obyek wisata Pantai Tirta Samudra. Selain itu ada beberapa informan mewujudkan rasa senang

pada keberadaan wisata Pantai Tirta Samudra terbatas pada ikut mengunjungi wisata tersebut.

Beberapa informan yang ditemukan merasa keberatan dengan pengembangan wisata Pantai Tirta Samudra. Hal ini dikarenakan pengembangan yang ada dinilai terlalu permisif dengan kegiatan-kegiatan negatif seperti prostitusi, minum minuman keras, perjudian, kebut-kebutan dan pengerukan pasir di sekitar pantai. Hal ini seperti yang dinyatakan salah satu informan:

" Kalau setujuanya lihat-lihat dulu...kalau pengembangannya dapat meningkatkan usaha masyarakat sini, ya..setuju mas, tapi kalau pengembangannya untuk mabuk-mabukan sama pelacuran, itu saya nggaksetuju.... "(Siti Khodari, 43 tahun)

Masalah-masalah masyarakat yang berkembang seperti prostitusi, minum minuman keras, dan perjudian dalam obyek wisata Pantai Bandengan telah menjadi masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Hampir seluruh informan mengemukakan masalah di atas sebagai salah satu masalah utama dalam wisata Tirta Samudra. Terlebih masalah ini menyebabkan beberapa korban jiwa dalam dalam kecelakaan lain lintas akibat pelaku dalam kondisi mabuk saat mengendarai motor.

Ketidaksenangan pada masalah di atas lebih banyak tidak pernah diungkapkan kepada aparat, sebagian besar terbatas pada pembicaraan masyarakat. Pembicaraan masyarakat pada masalah ini seperti yang dijelaskan informan:

"kita memang belum bicara he kepala desa, ...paling-paling hanya sebatas antarwarga sini saja yang ngomong saya sampai takitt kalau keluar malam ... lha kemarin saja ada yang keluar rumah, masih juga jam 7 malem, eh... ketabrak sama pengunjung yang mabuk-mabukan dan naiknya ngebut, padahal warga sinijalannya sudah minggir-minggir... " (Sukidi, 40 tahun)

Namun, beberapa informan menjelaskan bahwa mereka telah mencoba mengungkapkan pada perangkat desa termasuk pada kepala desa dengan berapa cara.

Masalah ini seperti diungkapkan oleh informan:

"Ya, kita pernah ngomong ke Pak Kepala Desa, malah kita pernah demo... bareng-bareng beberapa orang dateng ke Pak Kades, ngomongin masalah ini..." (Astiyah, 50 tahun)

2). Tingkat Kesenangan Pada Pengembangan Wisata Tirta Samudra sebagai

Wisata Andalan Kabupaten Jepara, fakta diperoleh dari responden penelitian sebagai tabel berikut :

Tabel IV.29

Tingkat Kesenangan Pada Pengembangan Wisata Tirta Samudra Sebagai Wisata Andalan Kabupaten Jepara

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	20	44,45
2.	Setuju	24	53,33
3.	Kurang Setuju	1	2,22
4.	Tidak Setuju	-	
	Jumlah	45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no. 13

Tabel IV. 28 di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh responden yaitu 44 orang (97,78%) menjawab sangat setuju/setuju jika Pantai Tirta Samudra akan dikembangkan sebagai wisata andalan Kabupaten Jepara. Hanya 1 responden saja (2,22%) yang menjawab kurang setuju jika Pantai Tirta Samudra akan dikembangkan sebagai wisata andalan Kabupaten Jepara. Informan yang menyatakan setuju pada pengembangan wisata Tirta Samudra mendasarkan pilihannya pada pertimbangan pengembangan wisata akan banyak memberikan nilai lebih pada kegiatan usaha masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mengangkat nama Desa

Bandengan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga desa.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yang membuka usaha toko di rumahnya:

" Saya sangat setuju jika Pantai Bandengan lebih dikembangkan lagi sebagai obyek wisata sebab selama ini banyak pengunjung yang mampir ke toko saya untuk beli makanan dan minuman, di samping itu daerah sini akan lebih dikenal masyarakat luarkan jadi ramai!"(Pak Doel Ahmad, 45 tahun)

Responden yang kurang setuju pada pengembangan wisata pantai mengkhawatirkan jika wisata pantai dikembangkan lagi, maka akan semakin mengembangkan pengaruh-pengaruh negatif pada masyarakat. Hal ini karena adanya beberapa pengunjung, baik wisatawan lokal maupun asing yang mengkonsumsi minuman keras pada pagi, siang, maupun malam hari. Sehingga ketika pulang dari pantai mereka naik mobil atau motor dengan kecepatan tinggi, akibatnya sering terjadi kecelakaan yang menimpa warga sekitar dan warga tidak bisa berbuat apa-apa.

Keberadaan Pekerja Seks Komersil (PSK) yang bekerja di beberapa rumah makan atau cafe di sekitar pantai, semakin meresahkan warga desa Bandengan terutama ibu-ibu rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan:

"Kita setuju-setuju sofa... kalan Pantai Bandengan akan dikembangkan lagi sebagai obyek wisata, tapi.... di sana itu ada beberapa pengunjung yang suka judi, mabuk-mabukan, terus... pulangny naik mobil/motor pada ngebut, sehingga warga sini sering jadi korban tabrak lari dan di rumah makan sana ada wanita nakalnya... ibu-ibu jadi resah,ibu-ibu minggu kemarin man demo supaya mereka diberantas, tapi gak jadi.... " (Noto, 52 tahun)

B. Sedangkan dari segi manfaat yang diharapkan dari pengembangan obyek wisata diperoleh gambaran seperti table berikut :

Tabel IV.30

Manfaat yang diharapkan

No	SKALA	Sangat tidak	Tidak diharapkan	Kurang diharapkan	Diharapkan	Sangat diharapkan
A. Manfaat Langsung						
1.1	Tambahan pendapatan keluarga	0 (0%)	2 (4,44%)	2 (4,44%)	11 (24,44%)	30 (66,68%)
1.2	Rekreasi murah	0 (0%)	0 (0%)	7 (15,56%)	18 (40%)	20 (44,44%)
1.3	Adanya kesempatan kerja	0 (0%)	1 (2,22%)	6 (13,34%)	10 (22,22%)	28 (62,22%)
1.4	Adanya tempat usaha	0 (0%)	0 (0%)	6 (13,34%)	15 (33,33%)	24 (53,33%)
B. Manfaat Tak Langsung						
1.5	Pengembangan kreativitas	0 (0%)	0 (0%)	11 (24,45%)	19 (42,22%)	15 (33,33%)
1.6	Berkembangnya berbagai usaha	0 (0%)	0 (0%)	3 (6,67%)	22 (48,89%)	20 (44,44%)
1.7	Bertambah majunya kehidupan masyarakat	0 (0%)	0 (0%)	4 (8,89%)	14 (31,11%)	27 (60%)

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no. 14 a

Tabel IV.29 menunjukkan, manfaat langsung yang sangat

diharapkan/diharapkan oleh masyarakat Desa Bandengan dari segi pendapatan keluarga, sejumlah 41 responden (66,68%) sedangkan 4 responden (8,88%) menjawab kurang/tidak diharapkan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan sangat mengharapkan/mengharapkan dengan lebih dikembangkannya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata akan meningkatkan pendapatan keluarga karena dengan meningkatnya jumlah pengunjung, maka usahanya menjadi lebih maju. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan:

"Saya sangat berharap sekali, kalau pantai Bandengan dikembangkan lagi sebab toko saya pasti bertambah pembelinya karena banyak pengunjung yang mampir ke sini sehingga pendapatan keluarga kami juga meningkat!"
(Didik Siswanto, 33 tahun)

Dari segi biaya rekreasi yang murah, sejumlah 38 responden (84,44%) menjawab sangat diharapkan/diharapkan dan 7 responden (15,56%) menjawab kurang diharapkan. Ini menunjukkan sebagian besar responden sangat mengharapkan atau mengharapkan biaya rekreasi di Pantai Bandengan murah, baik harga tiket masuk, biaya sewa perahu, souvenir maupun makanan atau minuman yang dijual di sana.

Biaya tiket masuk yang sebesar Rp.2500 per orang cukup dirasakan murah untuk sebuah tiket wisata. Namun ternyata bagi sebagian informan harga tersebut dirasakan masih mahal. Mahalnya tiket ini dikarenakan harga tiket tidak sebanding dengan pelayanan dan fasilitas yang terbatas. Masalah ini seperti diungkapkan oleh salah satu informan:

" Wah, kalau harga tiketnya segitu, itu memang mahal...maksudnya kalau fasilitasnya sudah bogus nggak masalah, tapi disitu kan fasilitasnya masih kurang... " (Nunuk W, 32 tahun)

Dari segi kesempatan kerja, sejumlah 38 responden (84,44%) menjawab sangat diharapkan/diharapkan dan 7 responden (15,56%) menjawab kurang/tidak diharapkan. Ini menunjukkan sebagian besar responden sangat mengharapkan/mengharapkan dengan lebih dikembangkannya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata, maka akan membuka lapangan kerja baru yang tenaga kerjanya diambil dari warga Desa Bandengan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan:

"Semoga saja... dengan lebih dikembangkan lagi, para pekerja di pantai Bandengan diutamakan yang berasal dari warga desa Bandengan "(Siti Khodari, 43 tahun)

Dari segi tempat usaha, sejumlah 39 responden (86,66%) menjawab sangat diharapkan/diharapkan dan 6 responden (13,34%) menjawab kurang diharapkan. Ini menunjukkan sebagian besar informan sangat mengharapkan atau mengharapkan dengan lebih dikembangkannya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata, maka akan lebih mudah untuk membuka tempat usaha di sana, seperti rumah makan, kios yang menjual kerajinan tangan, pakaian, dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan:

"Saya pengennya buka usaha toko souvenir di sana, jadi mudah-mudahan kalau pantai Bandengan akan lebih dikembangkan lagi, dapat dipermudah ijin membuka usaha di sana!" (Astiyah, 50 tahun)

Sedangkan manfaat tidak langsung yang diharapkan oleh masyarakat Desa Bandengan dari segi kreativitas masyarakat, sejumlah 34 responden (75,55%) menjawab sangat diharapkan/diharapkan dan 11 responden (24,45%) menjawab kurang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat mengharapkan/mengharapkan dengan lebih dikembangkannya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata, maka kreativitas masyarakat lebih dikembangkan, seperti dilibatkannya pemuda Desa

Bandengan pada acara pertunjukkan musik dangdut setiap hari Minggu atau Had Raya Ketupat. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Saya berharap para pemuda di sini dilibatkan dalam pementasan seni di pantai Bandengan karena yang sering tampil itu warga dari daerah luar, ya...masih warga Jepara juga, tapi bukan orang sini!" (DoelAhmad, 45 tahun)

Dari segi usaha masyarakat, sejumlah 42 responden (93,33%) menjawab sangat diharapkan/diharapkan dan 3 responden (6,67%) menjawab kurang diharapkan. Ini menunjukkan sebagian besar responden sangat mengharapkan atau mengharapkan dengan lebih dikembangkannya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata, maka berbagai usaha masyarakat akan lebih berkembang, seperti dagangannya menjadi laku dan jenis barang yang dijual bertambah. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Wah ...saya sangat berharap kalau pantai Bandengan lebih dikembangkan (agi, toko saya yang sekarang lebih maju dan saya pengen buka arena permainan anak-anak di sana, tapi kan juga butuh modal yang besar..." (Bam bang, 35 tahun)

Dari segi kehidupan masyarakat, sejumlah 41 responden (91,11%) menjawab sangat diharapkan/diharapkan dan 4 responden (8,89%) menjawab kurang diharapkan. Ini menunjukkan sebagian besar responden sangat mengharapkan atau mengharapkan pada upaya pengembangan lebih lanjut Pantai Bandengan sebagai obyek wisata. Diharapkan dengan pengembangan Pantai Bandengan kehidupan masyarakat akan lebih maju, seperti bertambahnya pengetahuan masyarakat dan pola pikir yang lebih terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Saya berharap dengan lebih dikembangkan lagi pantai Bandengan sebagai wisata andalan Jepara, kehidupan masyarakat di sini lebih baik, masyarakat lebih terbuka dalam berpikir sehingga tidak ketinggalan zaman" (Didik Siswanto, 33 tahun)

Tabel IV.31

Manfaat yang telah dirasakan

No	SKALA	Telah sangat dirasakan	Dirasakan	Kurang dirasakan	Belum dirasakan	Sama sekali belum dirasakan
A. Manfaat Langsung						
1.1	Tambahan pendapatan keluarga	7 (15,56%)	15 (33,33%)	8 (17,78%)	14 (31,11%)	1 (2,22%)
1.2	Rekreasi murah	4 (8,89%)	23 (51,11%)	14 (31,11%)	4 (8,89%)	0 (0%)
1.3	Adanya kesempatan	7 (15,56%)	18 (40%)	5 (11,11%)	14 (31,11%)	1 (2,22%)
1.4	Adanya tempat usaha	6 (13,34%)	14 (31,11%)	10 (22,22%)	13 (28,89%)	2 (4,44%)
B. Manfaat Tak Langsung						
1.5	Pengembangan kreativitas masyarakat	4 (8,89%)	11 (24,44%)	12 (26,67%)	14 (31,11%)	4 (8,89%)
1.6	Berkembangnya berbagai usaha masyarakat	6 (13,33%)	17 (37,78%)	12 (26,67%)	10 (22,22%)	0 (0%)
1.7	Bertambah Majunya kehidupan masyarakat	7 (15,55%)	18 (40%)	8 (17,78%)	12 (26,67%)	0 (0%)

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no. 14 b

Tabel IV.30 menunjukkan, manfaat langsung yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Bandengan dari segi pendapatan keluarga, sejumlah 22 responden (48,89%) menjawab sangat dirasakan/dirasakan, 23 responden (51,11%) menjawab kurang/belum/sama sekali belum dirasakan. Responden yang menjawab sangat

dirasakan/dirasakan dengan adanya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata dapat meningkatkan pendapatan keluarga karena Desa Bandengan menjadi ramai dan banyak pengunjungnya, sehingga usahanya menjadi laku. Sedangkan responden yang menjawab kurang/belum/sama sekali belum dirasakan dengan alasan usahanya, seperti mebel tidak ada hubungannya dengan keberadaan tempat wisata tersebut dan tempat usahanya jauh dari Pantai Bandengan dan sebagian besar yang menjawab adalah mereka yang bekerja sebagai tukang kayu dan buruh angkut. Seperti yang diungkapkan salah satu informan yang bekerja sebagai karyawan swasta dalam wawancara berikut ini:

"Saya belum merasakan keberadaan pantai Bandengan terhadap pendapatan keluarga sebab saya kan karyawan swasta jadi gak ada hubungannya dengan hal itu!" (Efi Fitriana, 24 tahun)

Dari segi biaya rekreasi murah, sejumlah 27 responden (60%) menjawab telah sangat dirasakan/dirasakan, 18 responden (40%) menjawab kurang/belum dirasakan. Ini menunjukkan sebagian besar responden telah sangat merasakan atau merasakan biaya rekreasi di Pantai Bandengan murah, baik harga tiket masuk, sewa perahu, souvenir maupun makanan dan minuman yang dijual di sana. Bahkan pengunjung yang berasal dari warga Desa Bandengan, tiket masuknya gratis. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Kaya'nya murah tiket masuk ke sana, bahkan warga sini seringkali nggak bayar kalau ke pantai, tapi harga makanan di sana lumayan mahal!" (Noto, 52 tahun)

Dari segi kesempatan kerja, sejumlah 25 responden (55,56%) menjawab telah sangat dirasakan/dirasakan dan 20 responden (44,44%) menjawab kurang/belum/sama sekali belum dirasakan. Responden di atas sebagian besar menyatakan telah sangat merasakan atau merasakan dengan keberadaan Pantai Bandengan sebagai obyek wisata,

memberi lapangan kerja bagi warga Desa Bandengan meskipun hanya sebagian kecil masyarakat Desa Bandengan yang terlibat. Sedangkan informan yang menjawab kurang atau belum atau sama sekali belum merasakan karena sebagian besar masyarakat Desa Bandengan pekerjaannya berhubungan dengan mebel, baik sebagai pemilik, tukang kayu, maupun buruh angkut. Sehingga informan di atas hanya merasakan keterkaitan tidak secara langsung pada keberadaan Pantai Tirta Samudra terhadap usaha mereka. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Sebenarnya usaha mebel saya, nggak ada hubungannya secara langsung dengan keberadaan pantai Bandengan karena pembelinya bukan dari para pengunjung pantai Bandengan melainkan orang luar, sedangkan warga sini kebanyakan bekerja sebagai buruh kayu, yang bekerja di sana hanya beberapa orang saja... "(Sukidi, 40 tahun)

Dari segi tempat usaha, sejumlah 20 responden (44,45%) menjawab telah sangat dirasakan/dirasakan dan 25 responden (55,55%) menjawab kurang/belum/sama sekali belum dirasakan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kurang/belum/sama sekali belum merasakan dengan adanya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata bagi warga untuk membuka tempat usaha di sekitar pantai karena pengelolaannya yang belum baik dan mengalami kesulitan perijinan ketika akan membuka tempat usaha di sana. Sedangkan informan yang menjawab bahwa tempat usaha telah sangat dirasakan atau dirasakan manfaatnya adalah mereka yang sudah mempunyai tempat usaha di lokasi wisata dan mereka yang pernah ditawari untuk membuka usaha di sana tetapi menolak karena keterbatasan modal serta kondisi di sana yang tidak memungkinkan, seperti pengunjung yang mabuk-mabukan, berjudi, dan wanita nakal. Seperti yang diungkapkan salah satu informan yang membuka toko di rumahnya dalam wawancara berikut ini:

"Saya pernah diterwari untuk buka warung makan di sana, tetapi saya menolak karena kalau ingin jualannya laku, kata orang-orang yang sudah berjualan di sana, jual saja minuman keras dan ada wanita penghibumya..."
(Noto, 52 tahun)

Sedangkan manfaat tidak langsung yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Bandengan dari segi kreativitas masyarakat, sejumlah 15 responden (33,33%) menjawab telah sangat dirasakan/dirasakan dan 30 responden (66,67%) menjawab kurang/belum/sama sekali belum dirasakan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan kurang/belum/sama sekali belum merasakan dengan adanya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata dalam hal pengembangan kreativitas masyarakat karena yang lebih sering dilibatkan adalah warga Jepara pada umumnya sedangkan warga Desa Bandengan masih sedikit yang terlibat bahkan jarang sekali mengisi acara pentas musik dangdut di sana. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"...yang ngisi acara pentas dangdut di pantai Bandengan sekarang bukan pemuda sini, melainkan warga luar, kita pengennya pemuda sini diikutsertakan juga.." (NurSalim, 27 tahun)

Dari segi usaha masyarakat, sejumlah 23 responden (51,11%) menjawab telah sangat dirasakan/dirasakan dan 22 responden (48,89%) menjawab kurang/belum dirasakan. Informan yang menjawab telah sangat dirasakan atau dirasakan dengan adanya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata karena usahanya menjadi lebih maju, baik dari jumlah maupun jenis barang yang dijual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan informan yang menjawab kurang atau belum merasakan adalah mereka yang tidak memiliki usaha dan yang memiliki usaha tetapi letak usahanya jauh dari pantai atau tidak terletak di jalan utama ke arah pantai. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Ya...saya senang karena usahapersewaan sayajadi berkembang, yang dulunya hanya menye-wakan ban pelampung sekarang soya juga menyewakan tikar, jualan sampo, sabun, dli." (Mastam, 40 tahun)

Dari segi kehidupan masyarakat, sejumlah 25 responden (55,56%) menjawab telah sangat dirasakan/dirasakan dan 20 responden (44,44%) menjawab kurang/belum dirasakan. Ini menunjukkan sebagian besar responden telah sangat merasakan atau merasakan dengan adanya Pantai Bandengan sebagai obyek wisata, maka kehidupan masyarakat lebih maju. seperti adanya pembangunan sarana dan prasarana desa. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Dengan adaya pantai Bandengan, warga sini berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa, seperti perbaikan jalan, lampu penerangan jalan, sekarang ini kita sedang merenovasi majid supaya bisa digunakan oleh warga dan dapat menampung jama'ah lebih banyak" (Didik Siswanto, 33 tahun)

C. Kebutuhan Untuk Pengembangan, berdasarkan kebutuhan untuk

pengembangan harapan responden terhadap pe4ngembangan obyek wisata

Tirta Samodra terlihat dalam table berikut :

Tabel IV.32

Harapan Responden dari Pengembangan Wisata Tirta Samudra

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Peluang usaha baru	13	28,89
2.	Mengembangkan usaha	22	48,89
3.	Mendapat kesenangan	7	15,55
4.	Lain-lain	3	6,67
Jumlah		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no. 15

Tabel IV. 31 di atas menunjukkan, harapan dari responden terhadap akan dikembangkan lagi Pantai Tirta Samudra sebagai obyek wisata adalah 13 responden (28,89%) menjawab dapat memberikan peluang usaha baru, yaitu mereka yang belum memiliki usaha atau ingin membuka usaha yang berbeda dari yang sudah mereka punya, seperti: membuka rumah makan, jualan souvenir, tempat permainan anak-anak di sekitar pantai; 22 responden (48,89%) menjawab dapat mengembangkan usaha yang telah ada, yaitu mereka yang sudah memiliki usaha toko atau mebel atau sewa perahu dan pelampung; 7 responden menjawab mendapatkan kesenangan baru, dan 3 responden menjawab lain-lain, yaitu mereka adalah mereka yang tidak ingin membuka usaha. Seperti yang diungkapkan salah satu informan dalam wawancara berikut ini:

"Kalau pantai Bandengan akan dikembangkan lagi, soya pengennya mengembangkan usaha toko saya saja yang ada di rumah, menambah jumlah dan jenis barang dagangan" (Siti Khodari, 43 tahun)

Berikut ini daftar kebutuhan bila obyek wisata akan dikembangkan, fakta yang diperoleh dari responden sebagai table berikut :

Tabel IV.33

Kebutuhan Responden Menurut Usaha

No.	Jenis Usaha	Modal Usaha	Peralatan
1.	Permainan Anak-Anak	± Rp 100.000.000,-	Perahu mainan
2.	Rumah Makan	±Rp 10.000.000,-	Alat masak, alat makan
3.	Mebel	±Rp 150.000.000,-	Pertukangan
4.	Toko Souvenir	±Rp 10.000.000,-	Etalase toko
5.	Kios kecil	±Rp 5.000.000,-	Meja, lemari, dll
6.	Persewaan Perahu	±Rp 8.000.000,-	Perahu

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no. 16

Tabel IV.32 menunjukkan bahwa besar kecilnya modal usaha yang diinginkan oleh responden yang akan membuka usaha berdasar pada jenis usahanya, apakah merupakan usaha besar, menengah atau kecil. Jenis usaha besar meliputi permainan anak-anak dan mebel yang membutuhkan dana di atas Rp 100.000.000,00 sedangkan usaha menengah atau kecil, seperti membuka rumah makan, toko souvenir, persewaan perahu dan kios kecil membutuhkan modal di atas Rp 5.000.000,00. Tempat usaha yang diinginkan adalah :

- Responden yang ingin membuka usaha baru, ingin mendapatkan tempat usaha di dalam obyek wisata Pantai Tirta Samudra.
- Informan yang ingin mengembangkan usaha yang telah ada, sudah merasa senang dengan tempat usaha yang terdapat di lingkungan tempat tinggalnya dan atau di lokasi di pusat kota.

Pendampingan Usaha

Informan yang menghendaki adanya pendampingan usaha dari Pemkab atau dinas yang terkait dalam kurun waktu sampai dengan usaha mereka berjalan dengan baik atau maju, karena jika masih ada permasalahan, mereka masih membutuhkan pendampingan usaha. Apalagi jika ada pinjaman modal dari

suatu instansi.

- Informan yang tidak menghendaki pendampingan usaha adalah mereka yang merasa bisa menjalankan usahanya sendiri berdasarkan kemampuan dan pengalaman sendiri, serta tidak merasa direpotkan/terbebani dengan adanya pendampingan usaha tersebut.

D. Bentuk Partisipasi

Kegiatan pembangunan desa sekitar lokasi obyek wisata yang melibatkan masyarakat Desa Bandengan adalah pembangunan masjid atau musholla, perbaikan jalan di kampung, kerja bakti bersih desa, dan pembuatan lampu jalan. Bentuk partisipasi responden dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel IV. 34

Bentuk Partisipasi Responden

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tenaga	20	44,44
2.	Uang	3	6,67
3.	Usul/Pendapat	-	-
4.	Keduanya	22	48,89
Jumlah		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no. 18

Tabel IV.33 menunjukkan, sejumlah 20 responden (44,44%) menjawab partisipasi mereka dalam bentuk tenaga, 3 responden (6,67%) menjawab uang, dan 22 responden (48,89%) menjawab keduanya (tenaga dan uang). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi seluruh responden secara fisik atau materi (tenaga dan uang), sedangkan dalam bentuk usulan atau pendapat belum ada yang berpartisipasi sehingga masih tergantung keputusan dan atas. Adapun pihak-pihak yang ikut menentukan bentuk kegiatan dalam pembangunan desa secara umum adalah Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RW,

Ketua RT. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan secara khusus (pembangunan masjid/musholla) ditentukan oleh Panitia Pembangunan dan Pengurus Masjid.

Sedangkan bentuk partisipasi dalam hal pariwisata, khususnya pembangunan pada Pantai Tirta Samudra, sebagian besar responden menjawab tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik tenaga, uang, maupun pendapat. Karena semua hal yang berhubungan dengan pengembangan objek wisata tersebut dilakukan oleh petugas atau instansi yang mengelolanya.

Tabel IV.35

Intensitas Responden dalam Kegiatan Pembangunan Desa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak pernah	4	8,89
2.	Kadang-kadang	18	40
3.	Seringkali	16	35,56
4.	Selalu	7	15,55
Jumlah		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no. 19

Tabel IV.34 menunjukkan, sejumlah 4 responden (8,89%) menjawab intensitasnya dalam kegiatan pembangunan desa tidak pernah terlibat, 18 responden (40%) menjawab kadang-kadang, 16 responden (35,56%) menjawab seringkali, dan 7 responden menjawab selalu. Responden yang menjawab kadang-kadang, dalam 2 bulan terakhir ikut terlibat pembangunan desa 1 - 2 kali; responden yang menjawab seringkali, dalam 2 bulan terakhir ikut terlibat pembangunan desa 4-6 kali; sedangkan responden yang menjawab selalu, dalam 2 bulan terakhir ikut terlibat pembangunan desa 8 kali (setiap minggu). Hal ini terungkap dalam wawancara dengan salah satu informan:

"saat ini warga dusun sini sedang membangun may id, jadi setiap minggu kita selalu kerja bakti...jadi dalam waktu 2 bulan ini, kita sudah kerja bakti 8 kali, apalagi saya juga panitia pembangunan masjid" (Bambang. 35 tahun)

Sedangkan intensitas dalam hal pembangunan objek wisata Pantai Tirta Samudra, sebagian besar responden menjawab tidak pernah terlibat. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu informan:

"wah...kalau kegiatan yang berhubungan dengan pantai Bandengan. kita tidak pernah ikut-ikutan, semua yang mengerjakan, termasuk membersihkan pantai, ya... para petugasnya" (Supriyanto, 35 tahun)

E. Pelibatan pada Tahapan Proyek 1).

1). Perencanaan

Tabel IV.36

Pola Partisipasi Responden dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan

No.	Pola Partisipasi	Frekuensi	Persentase
1.	Pasif	25	55,56
2.	Aktif	6	13,33
3.	Keterikatan	1	2,22
4.	Permintaan	13	28,89
Jumlah		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.22.1

Dari tabel IV.35, menunjukkan sebagian besar responden, yaitu sejumlah 25 orang (55,56%) menjawab pola partisipasi pasif dalam kegiatan perencanaan.

2). Pelaksanaan

Tabel IV.37

Pola Partisipasi Responden dalam Pelaksanaan Pembangunan

No.	Pola Partisipasi	Frekuensi	Persentase
1.	Pasif	25	55,56
2.	Aktif	5	11,11
3.	Keterikatan	1	2,22
4.	Permintaan	14	31,11
Jumlah		45	100

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan no.22.2

Dari tabel IV.36, menunjukkan sebagian besar responden, yaitu sejumlah 25 responden (55,56%) menjawab pola partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah pasif sedangkan sisanya menyebar pada kategori lain.

3. Pemanfaatan Hasil.

Dari segi pemanfaatan hasil pembangunan, pola partisipasi masyarakat, fakta yang berhasil dihimpun dari responden sebagai berikut :

Tabel IV. 38

Pola Partisipasi Responden dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

No.	Pola Partisipasi	Frekuensi	Persentase
1.	Pasif	17	37,78
2.	Aktif	12	26,67
3.	Keterikatan	-	-
4.	Permintaan	16	35,55
Jumlah		45	100

Sumber: Diolah dan jawaban pertanyaan no.22.3

Dari tabel IV.37, menunjukkan sebagian besar atau sejumlah 17 responden (37,78%) menjawab pola partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah pasif, sedangkan 16 responden atau 35, 55 % pola permintaan dan 12 responden (26,67%) menjawab pola partisipasi aktif.

Adapun responden yang menjawab peranan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan termasuk pola partisipasi pasif atau keterikatan adalah pembangunan yang berhubungan dengan pengembangan obyek wisata Pantai Tirta Samudra karena mereka beranggapan pantai tersebut dikelola oleh Pemkab Jepara atau Dinas Pariwisata sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pantai itu, baik pemeliharaan, penjagaan, dan lain-lain dilakukan oleh petugas saja sedangkan masyarakat bersifat pasif.

Sedangkan responden yang menjawab peranan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan termasuk pola partisipasi aktif atau permintaan adalah pembangunan yang berhubungan dengan desa itu langsung, seperti pembangunan masjid, pembuatan penerangan jalan, dan perbaikan jalan di kampung. Kegiatan itu dilakukan berdasarkan usulan atau permintaan dan warga Desa Bandengan, mengingat kurangnya sarana dan prasarana tempat ibadah atau umum di desa tersebut.

2. Pemberdayaan.

Agar obyek wisata yang telah dikembangkan bias ditingkatkan dan terjamin kelestarian dan keberlangsungannya pemberdayaan masyarakat sekitar terhadap obyek wisata mutlak diperlukan.

a. Obyek Wisata dan Lingkungannya

1). Pemeliharaan obyek melibatkan masyarakat

Penyertaan masyarakat dalam pemeliharaan obyek wisata, sehingga tidak hanya petugas saja yang memelihara obyek wisata tersebut. Misalnya:

- Melibatkan masyarakat untuk menindak orang-orang yang merusak obyek wisata tersebut, dengan cara melaporkan ke petugas, pelaku pengrusakan tersebut supaya mendapat teguran atau sanksi
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara obyek wisata
- Memelihara kebersihan fasilitas di sana, seperti kamar mandi/WC
- Pengunjung dan masyarakat yang mempunyai tempat usaha di sana supaya menjaga kebersihan obyek wisata.

2). Pemeliharaan lingkungan obyek oleh masyarakat:

- Perlu kerjasama pengelola dan masyarakat
- Pemerintah Kabupaten (pemb) harus lebih tegas dalam menindak orang-orang yang telah merusak lingkungan obyek wisata. seperti adanya pengambilan pasir di pantai sehingga terdapat lubang-lubang sumur di lokasi pantai

3). Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan

- Mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai bersama masyarakat Desa Bandengan secara berkala, misal satu bulan sekali
- Meningkatkan keamanan di sekitar obyek wisata, yaitu dengan menindak tegas orang-orang yang telah membuat kerusakan

4). Penciptaan kenyamanan pengunjung oleh masyarakat

- Perlunya penghijauan di dalam obyek wisata supaya lebih rindang
- Pedagang di dalam obyek wisata harus tertib serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat usahanya
- Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, seperti sikap ramah yang ditunjukkan oleh petugas dan masyarakat sekitar.
- Adanya petugas keamanan di dalam obyek wisata.
- Adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian, Pemkab Jepara, Dinas Pariwisata dan masyarakat Desa Bandengan untuk memberantas kegiatan penjualan minuman keras, mabuk-mabukan, perjudian, dan prostitusi di dalam obyek wisata karena pengunjung yang lain menjadi terganggu acara rekreasinya.

5). Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan obyek

- Perlunya kerjasama antara pengelola dengan masyarakat Desa Bandengan
- Adanya pembagian hasil pendapatan dari obyek wisata untuk Desa Bandengan, sehingga masyarakat akan merasa memiliki karena juga mendapatkan keuntungan
- Merekrut warga Desa Bandengan untuk bekerja di sana, seperti dilibatkannya masyarakat untuk menjaga parkir supaya pengunjung merasa tenang jika meninggalkan motor/mobilnya dan menatanya lebih rapi.

b. Ekonomi Masyarakat

1). Usaha produktif masyarakat terkait wisata

- Menambah tempat usaha yang telah ada, seperti rumah makan, kios souvenir atau kerajinan tangan, persewaan perahu, pembuatan wartel di dalam obyek wisata, dan lain-lain.
- Meningkatkan jenis barang yang dijual di dalam obyek wisata agar lebih bervariasi, seperti pakaian yang bercirikan Pantai Tirta Samudra dan souvenir yang terbuat dari hasil pantai.

2). Kelompok usaha sejenis

- Perlu ditingkatkan karena dengan dikembangkannya pantai sebagai obyek wisata maka akan meningkatkan jumlah pengunjung sehingga jumlah permintaan akan meningkat pula.

3). Pengembangan usaha melalui pelatihan

- Informan yang menjawab perlu adanya pelatihan bagi masyarakat yang akan membuka usaha di obyek wisata, seperti pelatihan ketrampilan bisnis dan manajemen, yaitu bagaimana kiat-kiat agar usahanya maju serta mengatasi persaingan yang terjadi di antara para pedagang.
- Informan yang menjawab tidak perlu adanya pelatihan adalah mereka yang hanya berdasarkan pada kemampuan dan pengalaman sendiri merasa mampu untuk mengembangkan usahanya serta tidak mau direpotkan atau terbebani dengan keberadaan para petugas dari dinas yang terkait.

4). Pengembangan usaha melalui pemupukan modal

- Informan yang menjawab perlu adanya pemupukan modal adalah mereka yang ingin membuka usaha baru di lokasi obyek wisata dan membutuhkan modal yang besar karena modal pribadi tidak mampu. Sekarang ini untuk mendapatkan pinjaman modal yang besar di bank sangat sulit. Sehingga mereka menginginkan pinjaman modal usaha dari instansi tertentu dan pengembaliannya dengan cara diangsur setiap bulan dalam jangka waktu tertentu.
- Informan yang menjawab tidak perlu adanya pemupukan modal adalah mereka yang ingin mengembangkan usaha yang sudah ada sebab mereka tidak mau terbebani dengan hutang karena khawatir jika sewaktu-waktu mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa melunasinya dan mereka sudah puas dengan menggunakan modalnya sendiri untuk mengembangkan usahanya.

5). Lain-Lain

Pengembangan usaha masyarakat dapat lebih baik, bila ada dukungan dari pemerintah kabupaten Jepara atau dinas yang terkait. Misalnya, kegiatan pemasaran atau promosi lewat media elektronik atau media cetak sehingga masyarakat luas mengetahui keberadaan obyek wisata Pantai Tirta Samudra.

Adanya peraturan yang jelas dari Pemkab Jepara atau Dinas Pariwisata tentang perijinan membuka tempat usaha di obyek wisata tersebut, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

D. Diskusi

1. Pola Partisipasi

1.1. Sikap Masyarakat

Hampir seluruh informan bersikap sangat setuju/setuju terhadap keberadaan pantai Tirta Samudra, apalagi jika pantai tersebut akan lebih dikembangkan lagi dan dijadikan obyek wisata andalan Kabupaten Jepara. Mereka sangat mendukung karena dengan adanya obyek wisata di Desa Bandengan, maka daerah tersebut akan lebih dikenal oleh masyarakat luas dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat mendapatkan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, sebagian besar informan yang menyatakan setuju juga memberikan syarat jika pantai Tirta Samudra akan dikembangkan lagi, yaitu dapat memberantas aktivitas negatif dari para pengunjung yang meresahkan masyarakat sekitar, seperti adanya penjualan minuman keras, wanita nakal, perjudian, kebut-kebutan, dan pengambilan pasir di sekitar pantai.

1.2. Manfaat

Dengan lebih dikembangkannya obyek wisata di pantai Tirta Samudra, diharapkan jumlah pengunjung, baik lokal maupun mancanegara menjadi meningkat, sehingga berdampak pada masyarakat setempat, terutama yang memiliki usaha, baik di lokasi

wisata maupun di luar lokasi wisata (di sepanjang jalan menuju obyek wisata pantai Tirta Samudra). Dari segi ekonomi, usaha masyarakat menjadi maju, sehingga pendapatan keluarga menjadi meningkat dan kehidupan masyarakat menjadi maju, baik dalam berpikir maupun berperilaku. Di samping itu, masyarakat juga berharap orang-orang yang akan dipekerjakan di sana, diambil dari masyarakat setempat sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi warga Desa Bandengan. Demikian juga halnya dengan kreativitas masyarakat, diharapkan lebih ditingkatkan, yaitu masyarakat dilibatkan secara langsung pada acara-acara yang dibuat di lokasi pantai, seperti pementasan musik dangdut.

1.3 Kebutuhan untuk Pengembangan

Adanya pengembangan obyek wisata Pantai Tirta Samudra, tentunya memberikan harapan bagi masyarakat sekitar. Sebagian besar informan ingin mengembangkan usaha yang telah mereka miliki, baik dari jenis, jumlah barang, maupun tempat usahanya. Sedangkan yang lainnya menginginkan membuka peluang usaha baru di sekitar lokasi wisata, seperti mendirikan rumah makan, menjual souvenir, arena permainan anak-anak, dll. Ada juga informan yang hanya ingin mendapatkan kesenangan saja, karena mereka tidak berminat untuk membuka usaha baru, mereka berharap jika pantai dikembangkan lagi akan lebih baik kondisinya dibandingkan keadaannya sekarang ini yang kurang pemeliharannya.

Informan yang ingin membuka usaha, tentunya membutuhkan modal. Adapun jumlah modal yang diburuhkan tergantung dari jenis usahanya. Jenis usaha besar meliputi permainan anak-anak dan mebel membutuhkan dana di atas Rp 100.000.000,00 sedangkan usaha menengah atau kecil, seperti membuka rumah makan, toko souvenir, persewaan perahu dan kios kecil membutuhkan modal di atas Rp 5.000.000,00. Informan ada yang menginginkan tempat usahanya di dalam obyek wisata, di lingkungan tempat tinggalnya atau di pusat kota. Tentang pendampingan usaha, ada informan yang menghendaki dengan alasan perlu bimbingan dalam menghadapi permasalahan yang muncul dan ada pula yang tidak menghendaki karena merasa bisa menjalankan usahanya berdasarkan kemampuan dan pengalaman sendiri serta tidak terbebani.

1.4. Bentuk Partisipasi

Pembangunan Desa Bandengan melibatkan masyarakat, seperti pembangunan masjid, perbaikan jalan di kampung, kerja bakti bersih desa dan pembuatan lampu jalan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari sumbangan tenaga dan uang. Sedangkan dalam bentuk usulan atau pendapat, belum ada / masih kurang yang berpartisipasi, sehingga masih tergantung pada keputusan dan atas, seperti Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, Ketua RW/RT.

Bentuk partisipasi dalam hal kegiatan pariwisata, khususnya pembangunan pada Pantai Tirta Samudra, sebagian besar informan menjawab tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk apapun,

baik tenaga, uang, maupun pendapat. Karena semua hal yang berhubungan dengan pengembangan objek wisata tersebut dilakukan oleh petugas atau instansi yang mengelolanya.

Informan yang menjawab peranan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan termasuk pola partisipasi pasif atau keterikatan adalah pembangunan yang berhubungan dengan pengembangan obyek wisata Pantai Tirta Samudra karena mereka beranggapan pantai tersebut dikelola oleh Pemkab Jepara atau Dinas Pariwisata sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pantai itu, baik pemeliharaan, penjagaan, dan lain-lain dilakukan oleh petugas saja sedangkan masyarakat bersifat pasif.

Partisipasi pasif ini lebih mengedepankan komunikasi satu arah, yaitu yang diterapkan oleh pengelola pantai dengan masyarakat desa Bandengan. Semua kebijakan diambil oleh pengelola/instansi yang terkait tanpa melibatkan masyarakat sekitar. Di samping itu juga menggunakan partisipasi keterikatan, yaitu antara pengelola pantai dengan masyarakat yang memiliki usaha di sana dengan cara memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk memelihara lingkungan di sekitar tempat usahanya, sehingga masing-masing pihak mendapat keuntungan.

Informan yang menjawab peranan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan termasuk pola partisipasi aktif atau permintaan adalah pembangunan

yang berhubungan dengan desa itu langsung, seperti pembangunan masjid, pembuatan penerangan jalan, kerja bakti bersih desa, dan perbaikan jalan di kampung. Kegiatan itu dilakukan berdasarkan usulan atau permintaan dari warga Desa Bandengan.

Partisipasi aktif ini mengedepankan dialog dan komunikasi dua arah, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas. Sedangkan partisipasi permintaan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mereka lebih tanggap dan memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Obyek Wisata Pantai Tirta Samudra Bandengan Jepara yang merupakan salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Jepara memiliki ciri khas dengan pasir putihnya. Lokasi wisata pantai ini tergolong luas dengan berbagai rerimbunan pohon yang mampu menarik minat wisatawan baik lokal maupun manca negara. Di obyek wisata ini juga sering digunakan untuk kegiatan motocross dan olah raga rekreatif lainnya. Untuk menjangkau obyek wisata Pantai Tirta Samudra cukup mudah karena sudah tersedia angkutan yang langsung menuju lokasi obyek. Sepanjang tahun jumlah wisatawan mengalami peningkatan. Namun demikian untuk pengembangan obyek masih menemui banyak kendala terutama partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat lokal yang masih sangat kurang atau cenderung pasif.

Sikap masyarakat Desa Bandengan hampir seluruhnya menyatakan setuju terhadap keberadaan Pantai Tirta Samudra, apalagi

jika nantinya dikembangkan lagi dan dijadikan Obyek Wisata Andalan Kabupaten Jepara, sehingga daerah Bandengan akan lebih dikenal oleh masyarakat.

Sebagian besar masyarakat desa Bandengan juga memberikan syarat jika Pantai Tirta Samodra dikembangkan hendaknya dibenrantas aktifitas negatif para pengunjung yang meresahkan masyarakat sekitar dengan adanya penjualan minuman keras, wanita nakal, mabuk-mabukan dan lain-lain.

Tentunya dengan sikap sebagaimana diatas masyarakat menginginkan adanya manfaat bagi kehidupannya. Mereka menginginkan penambahan jumlah pengunjung baik lokal maupun manca negara. Hal itu berkaitan dengan usaha masyarakat dimana dengan penambahan jumlah pengunjung secara tidak langsung akan menambah jumlah pendapatan. Dari segi ekonomi usaha masyarakat akan menjadi maju, yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga sehingga kehidupan masyarakat yang maju akan berpengaruh pada kemajuan pola pikir dan perilaku. Pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan/ acara yang dilakukan juga sangat diharapkan seperti pementasan musik, sehingga kreatifitas masyarakat akan meningkat.

Disamping kedua hal diatas pola partisipasi juga terkait dengan kebutuhan untuk pengembangan did. Dengan pengembangan obyek wisata tentunya memberikan harapan yang begitu besar bagi masyarakat sekitar. Sebagian dari mereka ingin mengembangkan usahanya baik dari segi jenis, jumlah maupun mutu barang

dagangannya. Sedangkan masyarakat yang lain ingin membuka jenis usaha baru yang berpeluang di sekitar lokasi misalnya mendirikan rumah makan, penjualan souvenir, arena permainan anak-anak. Sampai sekarang system penjualan dan jenisnya masih sangat tradisional dan berkesan apa adanya. Belum ditemukan penjual yang kreatif memasarkan barang dagangan berupa souvenir, dan jenis kerajinan yang lain. Sementara itu minat para pengunjung untuk membeli oleh-oleh souvenir semakin meningkat. Sementara itu masyarakat juga mencemaskan dengan keinginan mereka mengembangkan usaha, karena faktor permodalan. Jumlah modal yang dibutuhkan tentunya terkait dengan jenis usaha yang digelutinya. Untuk jenis usaha permainan anak-anak membutuhkan dana diatas Rp. 100.000.000,- sedangkan untuk usaha menengah dan kecil seperti penjualan souvenir, persewaan perahu, rumah makan dan kios kecil membutuhkan modal diatas Rp. 5.000.000,-. Namun masyarakat berharap jika pengembangan obyek wisata dilakukan maka faktor keamanan pelaku usaha harus diperhatikan.

Desa Bandengan seperti desa-desa yang lain di Kabupaten Jepara memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh desanya. Pembangunan masjid, pengerasan jalan dan lain-lain selalu melibatkan masyarakat baik dalam bentuk sumbangan tenaga maupun uang. Namun untuk sumbangan pemikiran/ pendapat dan usulan dirasakan masih kurang.

Dalam hal kegiatan wisata di Pantai Tirta Samudra, sebagian besar masyarakat menyatakan tidak pernah memberikan sumbangan dan partisipasinya baik tenaga uang maupun pendapat. Menurut mereka semua kegiatan di obyek wisata Pantai Tirta Samudra dilakukan oleh instansi pemerintah dengan petugas pengelola.

Jenis Partisipasi masyarakat desa Bandengan dengan adanya keberadaan Pantai Tirta Samudra sementara ini bersifat pasif. Mengapa demikian karena mereka sebagian besar beranggapan bahwa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tidak dilibatkan sehingga mereka berjalan apa adanya tanpa konsep dan ini sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dengan pola partisipasi pasif tentunya komunikasi yang dibangun adalah komunikasi satu arah dimana semua kebijakan diambil oleh pemerintah. Disamping itu juga partisipasi keterkaitan yaitu antara pengelola pantai Tirta Samudra dengan masyarakat yang memiliki usaha disana untuk menjaga kebersihan di sekitar tempat usahanya, sehingga kedua belah pihak yaitu pemerintah dalam hal ini pengelola dengan masyarakat akan saling diuntungkan. Akan tetapi pola semacam ini sering mendapat hambatan apabila pihak masyarakat tidak peduli akan lingkungannya dan pemerintah acuh-acuh saja.

Sebagian besar masyarakat menginginkan adanya pola partisipasi aktif sebagaimana yang telah mereka lakukan pada kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya. Karena partisipasi aktif

selalu mengedepankan komunikasi dua arah, sehingga akan memberikan kebebasan masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas.

Berikut adalah hasil analisa berupa matrik dimensi pariwisata dan bentuk-bentuk partisipasi. label IV. 38 menunjukkan bahwa manifestasi partisipasi lebih banyak pada sikap, kemudian sedikit sumbangan, sedang tanggungjawab masih sangat minim.

TABEL IV. 39

MATRIK DIMENSI WISATA DAN BENTUK PARTISIPASI

N O	DIMENSI WISATA	KECENDERONGAN BENTUK KELIBATAN			
		Sikap	Sumbangan	Tanggungjawab	Keterangan
1	ATRAKSI WISATA : Alara (pantai). Perahu. taman.	<ul style="list-style-type: none"> - Positif pada keberadaan pantai - Sikap positif pada pengadaaan perahu karena naluri usaha saja - Profesi mengant 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara tidak sengaja, muncul karena peluang usaha - Usaha perahu muncul sebagai kebutuhan nafkah (belum berorientasi tourism 	<ul style="list-style-type: none"> - keaktifan baru dalam memelihara perahu miliknya - pemeliharaan taman : belum ada kelibatan. Masy. Masih melihat sebagai milik pemda. - Masy. tidak merasa perlu mengawasi/ menjaga pantai 	
2	AKSESIBILITAS : jalan masuk. jalan dim obyek	<i>Sikap</i> : umumnya positif seperti pada fasilitas / prasarana umum, tetapi belum pada prasarana wisata	<i>Sumbangan</i> : - pemeliharaan jalan pada kerusakan ringan	<i>Tanggungjawab</i> : - untuk jalan umum masih ada perhatian, jalan wisata dianggap hanya pengelola yang bertanggungjawab.	
3	SARANA PRASARANA : WC umum. Mushola. Tempat bilas. Speed Boat	<i>Sikap</i> : positif, ikut memanfaatkan	<i>Sumbangan</i> : - mulai tumbuh	<i>Tanggungjawab</i> : sebatas kepemilikan.	
4	KEUNIKAN : Pasir putih. Karang, ikan hias	<i>Sikap</i> : tidak begitu peduli, atau tidak menyadari bahwa keunikan tsb. merp. aset			
5	KERAMAHAN	<i>Sikap</i> : keramahan biasa, sebatas pada pergaulan antar manusia, belum berorientasi wisata			
6	CINDERAMATA : kerajinan kerang. kerajinan dari kerang. tenun troso. monel. ukir kecil.	<i>Sikap</i> : positif		<i>Tanggungjawab</i> : belum ada upaya menambah jenis sebagai bentuk tanggungjawab	

7	JASA PENDUKUNG : Perahu wisata. waning makan. restoran eksklusif.	<i>Sikap</i> : sumbangan : masih terbatas			
8	ORG.SASI PENGELOLA : Dinas Pariwisata	<i>Sikap</i> : kurang kooperatif			

Sumber : data primer kualitatif diolah

2. Pemberdayaan

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan obyek wisata Pantai Tirta Samudra adalah kurang terlibatnya masyarakat sekitar terhadap pengelolaan obyek wisata disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memelihara obyek wisata dan lingkungannya. Hal ini juga disebabkan oleh hasil pendapatan dari wisata pantai Tirta Samudra, semuanya untuk instansi pengelola/pemkab, sedangkan untuk Desa Bandengan di mana obyek wisata itu berada, tidak mendapatkan pembagian hasil.

Berdasarkan hal di atas yang dapat dilakukan oleh pemkab untuk memberdayakan masyarakat Desa Bandengan, dilakukan dengan pentahapan pendekatan sebagai berikut:

Tahap I:

Dengan temuan bahwa pola partisipasi dalam kegiatan wisata termasuk pola partisipasi paling rendah / pasif, maka diperlukan konsep pemberdayaan yang harus diawali dengan "arahan". Pendekatan arahan ini memang masih mengedepankan inisiatif Pemerintah Daerah atau lebih khusus, pihak manajemen obyek wisata. Bentuknya berupa pelibatan masyarakat sekitar yang terutama ditujukan pada menarik simpati dan membuka kesadaran akan kemanfaatan obyek bagi mereka. Karena baru membuka ruang simpati, kegiatan ini lebih bersifat "promotif", belum menuju pada "profit".

Tahap II :

Secara perlahan upaya pemberdayaan kegiatan wisata masyarakat ditingkatkan dengan ikatan kontrak antara pengelola dengan masyarakat sekitar.

Kontrak ini perlu dibicarakan baik bentuk maupun kompensasi yang menguntungkan kedua pihak. Karena sudah tahapan kedua, maka profit atau keuntungan harus mulai dipertimbangkan.

Tahap III:

Bila tahap I dan II menampakkan hasil sesuai rencana, yakni memperlihatkan kecenderungan peningkatan partisipasi, kegiatan masyarakat dalam wisata perlu diperluas pada pemenuhan "usulan kegiatan" yang berasal dari mereka, yang artinya tahapan partisipasi mengarah pada permintaan sendiri. Langkah ini berarti pula, telah tumbuh kebutuhan dari mereka akan perlunya pengembangan kegiatan wisata dari mereka sendiri. Karena melibatkan motif keuntungan bagi masyarakat sendiri, maka selain pengembangan obyek yang berarti keuntungan pihak manajemen obyek, juga terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Konsep pemberdayaan bertahap di atas, secara lebih konkrit perlu diarahkan pada bentuk-bentuk kegiatan masyarakat dalam :

a. Mengembangkan kemampuan ekonomi sekitar obyek wisata

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha di sekitar obyek wisata, yaitu bagaimana caranya mengembangkan usahanya, baik dari tempat usaha, jenis, jumlah barang yang ditawarkan, dan pelayanan yang baik kepada pengunjung. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung, fasilitas di sana pun juga mengalami peningkatan.

b. Menumbuhkan kegiatan kemampuan ekonomi sekitar obyek wisata.

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai usaha di

sekitar obyek wisata, tetapi mereka mempunyai keinginan untuk membuka usaha baru agar pendapatan keluarga meningkat, yaitu dengan memberikan tempat usaha di dalam obyek wisata yang nyaman, biaya sewa lokasi terjangkau oleh masyarakat, dan tertata rapi.

a. Kemampuan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sendiri

Hal ini berhubungan dengan kegiatan pembangunan desa, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Diharapkan masyarakat setempat tidak merusak lingkungan obyek wisata yang bertujuan untuk pembangunan desa, seperti pengambilan pasir secara liar di sekitar pantai sehingga muncul lubang-lubang sumur. Oleh sebab itu, perlunya tindakan tegas terhadap masyarakat yang ketahuan pelanggaran tersebut. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan desa yang bersifat kepentingan umum, perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk pemberian bantuan tenaga, uang, atau pendapat.

b. Penguatan posisi tawar dalam pembangunan di sekitar obyek wisata

Dalam melaksanakan pembangunan di sekitar obyek wisata, perlu kerjasama antara pengelola dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Ikut dilibatkannya masyarakat dalam mengelola obyek wisata tersebut, misalnya menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, menjaga kebersihan obyek wisata, sebagian besar yang bekerja di sana adalah masyarakat sekitar, masyarakat sekitar diberi kesempatan yang lebih besar untuk membuka usaha di sana, dll.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pola partisipasi:

- a. Sikap masyarakat pada keberadaan obyek pada umumnya sudah positif, yakni mereka setuju dengan pengembangan obyek, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Sikap pada kegiatan pembangunan obyek, mereka anggap urusan petugas, bukan urusan masyarakat.
- b. Manfaat dari keberadaan obyek pada umumnya belum dapat mereka rasakan. Meski mereka menginginkan manfaat yang lebih besar, namun umumnya mereka mengaku belum merasakan manfaat.
- c. Kebutuhan pengembangan : pada umumnya mereka membutuhkan munculnya peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang sudah ada dengan adanya pengembangan obyek wisata.
- d. Bentuk partisipasi umumnya berupa sumbangan tenaga dan uang. Namun demikian umumnya dengan frekuensi yang sangat jarang. Bentuk partisipasi setelah didalami ternyata pada kegiatan pembangunan pada umumnya atau tempat ibadah pada khususnya, sedang dalam kegiatan wisata sama sekali belum ada.
- e. Secara lebih tegas, pada pentahapan pembangunan, baik perencanaan, maupun pelaksanaan belum terlihat aktif. Jadi masih pasif. Hanya

pada pemanfaatan hasil pembangunan keaktifan mulai terlihat. Dengan demikian disimpulkan bahwa POLA PARTISIPASI masyarakat dalam kegiatan wisata pantai Tirta samudra masih dalam tataran POLA PASIF.

B. SARAN

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata hendaknya diupayakan melalui peningkatan pola partisipasinya
2. Pola partisipasi pasif dan masyarakat perlu ditingkatkan menjadi pola-pola yang lebih tinggi, yakni aktif, keterikatan bahkan permintaan. Peningkatan ini bertahap, yakni tahap 1. 2 dan 3.
3. Tahap 1 : Peningkatan pola partisipasi pasif ke aktif dapat dilakukan dengan model arahan. Hal ini berarti: Bentuknya berupa pelibatan masyarakat sekitar obyek yang terutama ditujukan pada kegiatan menarik simpati dan membuka kesadaran akan kemanfaatan obyek bagi mereka. Karena baru membuka ruang simpati, kegiatan ini lebih bersifat "promotif", belum menuju pada "profit".
4. Tahap 2 : Peningkatan pola partisipasi aktif ke pola keterikatan dilakukan dengan model "kontrak". Secara perlahan upaya pemberdayaan kegiatan wisata masyarakat ditingkatkan dengan ikatan kontrak antara pengelola dengan masyarakat sekitar. Kontrak ini perlu dibicarakan baik bentuk

maupun kompensasi yang menguntungkan kedua pihak. Karena sudah tahapan kedua, maka profit atau keuntungan harus mulai dipertimbangkan.

5. Tahap 3 : peningkatan pola partisipasi keterikatan ke permintaan. Bila tahap I dan II menampakkan hasil sesuai rencana, yakni memperlihatkan kecenderungan peningkatan partisipasi, kegiatan masyarakat dalam wisata perlu diperluas pada pemenuhan "usulan kegiatan" yang berasal dari mereka, yang artinya tahapan partisipasi mengarah pada permintaan sendiri. Langkah ini berarti pula, telah tumbuh kebutuhan dari mereka akan perlunya pengembangan kegiatan wisata dari mereka sendiri. Karena melibatkan motif keuntungan bagi masyarakat sendiri, maka selain pengembangan obyek yang berarti keuntungan pihak manajemen obyek, juga terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6. Konsep pemberdayaan bertahap di atas, secara lebih konkrit perlu diarahkan pada bentuk-bentuk kegiatan masyarakat dalam :

- a. Mengembangkan kemampuan ekonomi sekitar obyek wisata

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha di sekitar obyek wisata, yaitu bagaimana caranya mengembangkan usahanya, baik dari tempat usaha, jenis, jumlah barang yang ditawarkan, dan pelayanan yang baik kepada pengunjung. Sehingga dengan adanya

peningkatan jumlah pengunjung, fasilitas di sana pun juga mengalami peningkatan.

b. Menumbuhkan kegiatan kemampuan ekonomi sekitar obyek wisata

Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai usaha di sekitar obyek wisata, tetapi mereka mempunyai keinginan untuk membuka usaha baru agar pendapatan keluarga meningkat, yaitu dengan memberikan tempat usaha di dalam obyek wisata yang nyaman, biaya sewa lokasi terjangkau oleh masyarakat, dan tertata rapi.

c. Kemampuan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sendiri.

Hal ini berhubungan dengan kegiatan pembangunan desa, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Diharapkan masyarakat setempat tidak merusak lingkungan obyek wisata yang bertujuan untuk pembangunan desa, seperti pengambilan pasir secara liar di sekitar pantai sehingga muncul lubang-lubang sumur. Oleh sebab itu, perlunya tindakan tegas terhadap masyarakat yang ketahuan pelanggaran tersebut. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan desa yang bersifat kepentingan umum, perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk pemberian bantuan tenaga, uang, atau pendapat.

d. Penguatan posisi tawar dalam pembangunan di sekitar obyek wisata

Dalam melaksanakan pembangunan di sekitar obyek wisata, perlu kerjasama antara pengelola dengan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Ikut dilibatkannya masyarakat dalam mengelola obyek wisata tersebut, misalnya menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, menjaga kebersihan obyek wisata, sebagian besar yang bekerja di sana adalah masyarakat sekitar, masyarakat sekitar diberi kesempatan yang lebih besar untuk membuka usaha di sana, dll.

Daftar Pustaka

- Friedmann John, 1992, *Empowerment : The Politics and Alternative Development*, Blactewell Publishers, Cambridge, Massachusetts, 02142, USA.
- Hadinoto, Kusudianto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, U – I Press, Jakarta, 1996
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1995
- Inskeep, Efward, *Tourism Planning*, An Integrated and Sustainable Development Approach, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991
- Karyono, Hari, *Kapariwisata*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Kartasasmita Ginandjar, 1996, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Korten DC, 1993, *Menuju Abad 21 : Tindakan Suka Rela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (diterjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana).
- Kuncoro Mudrajat, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Korten, David., C., (1984), *People Centered Development, Contributions toward Theory and Planning Frameworks*, Kumarian Press, Connecticut
- Lindberg, Kreg dan Donald E. Hawkins, *Ekoturisme : Petunjuk Untuk Perencana dan Pengelola* (Edisi Bahasa Indonesia), Yayasan Alam Mitra Indonesia (ALAMI), Jakarta, 1995
- Marpaung, Happy, *Pengetahuan Kepariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2000
- Mill, Robert Christie, *Tourism, The International Business*, (Edisi Bahasa Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Mas'oed Mochtar, 1994, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kuantitatif*, UI Press, Jakarta, (diterjemahkan oleh ; Cecep Rohendi Rohidi).
- Moleong Lexy. J, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roesdakarya, Bandung.
- Mubyarto, 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta.

Moeljarto, Tjokrowinoto 1993, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Moeljarto, Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S, (ed), 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS Jakarta.

Rangkuti, Freddy, *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan kepuasan Pelanggan, plus Analisis kasus PLN – JP*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,

Reksopoetranto, soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pembangunan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta

Simamora, Henry, , *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2001.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995

Samsurijal, D., dan Katany HD., *Peluang di Bidang Pariwisata*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997

Sihite, Richard, *Tourism Industry (Kepariwisataan)*, SIC, Jakarta, 2000

Soekadjo, *Anatomi Pariwisata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Salim Emil, 1992, *Pembangunan Berkelanjutan : Keperluan Penerapannya di Indonesia, Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia , Mencari Format Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan SPES, Jakarta.

Schumacher, 1973, *Small is Beautiful*, Blond and Bridges, Londong, England.

Sedarmayanti, 2000, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Siagian P Sondang, 1991, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Soetrisno Loekman, 1995, *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Anggito Abimanyu, dkk), PAU-SE UGM bersama BPFE UGM, Yogyakarta.

Sumodiningrat G, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, Yogyakarta.

Supriatna Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Swasono Sri Edi, 1998, *Pendekatan Pemberantasan Kemiskinan*, Makalah pada Seminar Nasional HMJP Ekonomi IKIP Malang, 25 Oktober 1998.

Syamsi Ibnu, 1986, *Pengantar Studi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Tjiptiono, Fandy, dan Anastasia Diana, 2001, *Total Quality Mangement*, Edisi Ke empat, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta

Tjiptono, Fandy, 2001, *Manajemen Jasa*, Edisi ke dua, Andi offset, Yogyakarta

Tjiptono, Fandy, 1997, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Andi offset, Yogyakarta

Wahab, Salah, *Manajemen Kepariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Wiratno, Tatag dan Antonius Tarigan, 2002, *Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, N0. 28, Juli – September 2002, Bappenas, Jakarta, 2002

Yoeti, Oka A., *Psikologi Pelayanan Wisata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

_____, 2001, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Edisi Ke dua, Cetakan Kedua, Andi, Yogyakarta